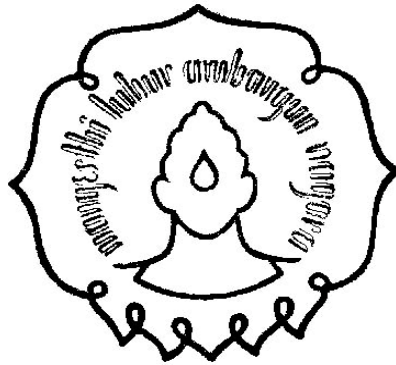


**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA  
PERIMBANGAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP  
PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DI PROPINSI JAWA  
TENGAH PERIODE  
TAHUN ANGGARAN 2005-2007**



**Skripsi**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas- tugas dan Memenuhi  
Syarat- syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi  
Universitas Sebelas Maret Surakarta*

**Oleh:**

**PRASETYO YULI PURNOMO**  
**NIM F 1105022**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

2010

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN,  
DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH  
DAERAH DI PROPINSI JAWA TENGAH PERIODE  
TAHUN ANGGARAN 2005-2007**

Surakarta, 5 April 2010

*Disetujui dan diterima oleh*

Pembimbing



(Siti Ajsyah TR, SE, M.si.)  
NIP.132164107

**HALAMAN PENGESAHAN**

Telah disetujui dan diterima baik oleh team penguji skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi.

Surakarta, 5 April 2010

**Tim Penguji Skripsi**

1. Izza Mafruhah, SE, M.si  
NIP.132300215
2. Siti Aisyah TR, SE, M.si  
NIP.132164107
3. Akhmad Daerobi, Drs, MS  
NIP.131569280

KETUA (.....)

PEMBIMBING (.....)

ANGGOTA (.....)

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh”(Albert Einstein)**

**“Tidak ada kemenangan dan keberhasilan tanpa ada pengorbanan dan ketekunan, dan tak ada pengorbanan dan ketekunan yang berhasil tanpa ada keyakinan”(Bukhori Muslim)**

### **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, skripsi penulis persembahkan kepada:

- Papa dan Mama tercinta yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan mendukung setiap langkah penulis.
- Keluarga dan kekasih yang selalu mendukungku.
- Teman-teman kos dan teman-teman balapan.
- Almamaterku UNS.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DI PROPINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN ANGGARAN 2005-2007”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh guna meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis sehingga dapat menjadi bekal dikemudian hari.

Penulis menyadari bahwa segala hambatan dapat teratasi karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Ibu Siti Aisyah T R, SE, M.si selaku Pembimbing Skripsi yang dengan arif dan bijak telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan serta pengarahan sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, yang selama ini telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis dapat menambah khasanah pengetahuan yang nantinya dapat dipraktikkan dalam masyarakat.
5. Orang tua yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya kepada pembaca yang berkepentingan.

Surakarta, 5 April 2010

Penulis



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA  
PERIMBANGAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP  
PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DI PROPINSI JAWA  
TENGAH PERIODE  
TAHUN ANGGARAN 2005-2007**

**ABSTRAK**

**Prasetyo Yuli Purnomo  
NIM F 1105022**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (DP) dan jumlah penduduk (JP), dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah. Dengan mengetahui keadaan tersebut maka diharapkan pemerintah daerah mampu memaksimalkan segala potensi yang ada untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Desain penelitian ini bersifat kuantitatif. Obyek penelitian adalah 35 Kota dan Kabupaten di propinsi Jawa Tengah berdasarkan PAD, dana perimbangan, jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah daerah tahun 2005-2007. Data dalam penelitian ini adalah data panel (gabungan dari *cross-sectional data* dan *time series data*).

Kesimpulan penelitian, yaitu: (1) melalui uji F, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta Jumlah Penduduk mempengaruhi nilai pengeluaran pemerintah pada masing-masing daerah se Jawa Tengah. (2) Dari hasil pengujian koefisien regresi (uji t) terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap pengeluaran pemerintah daerah. (3) Dana Perimbangan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel pengeluaran pemerintah di Kota dan Kabupaten se Jawa (4) Jumlah Penduduk secara signifikan berpengaruh terhadap variabel pengeluaran pemerintah di Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah.

Saran yang dapat diberikan : Pemda perlu meningkatkan PAD dengan memaksimalkan kekayaan sumber daya alam seperti tempat-tempat wisata, daerah tambang minyak dan memberikan modal kepada masyarakat yang memiliki kekayaan alam untuk diolah dan dijadikan pemasukan daerah sehingga dapat meningkatkan PAD. Untuk Dana Perimbangan, pengelola perlu mengetahui sumber-sumber pendapatan masing-masing daerah sehingga dapat menyeimbangkan antara pendapatan dengan pengeluaran dengan lebih seksama. Untuk Jumlah Penduduk, Pemerintah daerah perlu menata kembali kebijakan kependudukan di wilayah masing-masing. Selain itu pemerintah perlu mensosialisasikan pentingnya pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peranan masyarakat dalam keikutsertaannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki sumber daya manusia dengan tingkat



pendidikan tinggi yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian serta kesejahteraan masyarakatnya meningkat.

**Kata kunci: PAD, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah Daerah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Otonomi Daerah.....	9
B. Pendapatan Asli Daerah .....	19
C. Pengeluaran Pemerintah.....	25

	10
1. Hukum Wagner .....	26
2. The Displacement Effect.....	27
D. Dana Perimbangan .....	28
1. Dana Bagi Hasil .....	28
2. Dana Alokasi Umum.....	29
3. Dana Alokasi Khusus.....	29
E. Penduduk .....	30
F. Penelitian Terdahulu .....	32
G. Kerangka Pemikiran.....	37
H. Hipotesis.....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber Data .....	39
C. Definisi Operasional Variabel .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Teknik Analisis Data .....	41
1. Metode Data Panel .....	41
2. Estimasi Model Data Panel .....	44
3. Pemilihan Metode Estimasi Data Panel .....	48
4. Pemilihan Model Data Panel.....	51
5. Uji Statistik .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	57

	11
1. Luas Wilayah .....	57
2. Wilayah Administrasi .....	57
3. Pariwisata .....	58
4. Keadaan Penduduk .....	60
5. Pertumbuhan Perekonomian Daerah.....	60
6. Tinjauan Keuangan Daerah.....	63
B. Hasil Analisis dan Pembahasan.....	68
1. Pendekatan PLS .....	68
2. Pendekatan Fixed Effect .....	70
3. Pendekatan Random Effect.....	71
C. Hasil Pemilihan Model.....	72
1. Uji Restricted-F.....	72
2. Uji <i>Langrange Multiplier</i> (LM).....	73
D. Pengujian Hipotesa.....	75
1. Uji T-Statistik.....	75
2. Uji F-Statistik.....	76
3. Uji Koefisien $R^2$ .....	76
4. Interpretasi .....	77
5. Pembahasan.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman	
4.1	Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2007.....	58
4.2	Rata-rata pertumbuhan ekonomi Tahun Jawa Tengah Tahun 2005 – 2007.....	62
4.3	Pengeluaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2007 (Ribu rupiah).....	63
4.4	PAD Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2007(Ribu rupiah).....	65
4.5	Dana Perimbangan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2007 (Ribu rupiah).....	67
4.6	Hasil Estimasi Data Panel Periode 2005-2007 dengan Pendekatan PLS (Common).....	69
4.7	Hasil Estimasi Data Panel Periode 2005-2006 dengan Pendekatan Fixed Effect.....	70
4.8	Hasil Estimasi Data Panel Periode 2005-2007 dengan	

71	Pendekatan Random Effect.....	
4.9	Hasil Uji Signifikansi.....	75

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

	Halaman	
2.1	Kerangka Pemikiran .....	37
3.1	Daerah Krisis Uji t .....	54
3.2	Daerah Krisis Uji F .....	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem pemerintahan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan selalu mengalami perkembangan. Saat sekarang ini sistem pemerintahan didasarkan pada Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasar pada UUD 1945 yang menganut asas desentralisasi memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan dalam segala bidang. Dalam otonomi yang bertanggung jawab dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah.

Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam undang-undang No. 22 Tahun 1999, yaitu:

- a. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota.
- c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa.

Tugas dan kewajiban pada pemerintahan otonomi daerah tingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur, daerah kabupaten dilaksanakan oleh Bupati dan di daerah kota dilaksanakan oleh Walikota. Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi, Bupati dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/walikota.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa sistem pemerintahan menekankan pada otonomi daerah maka kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan mengelolanya untuk kepentingan daerah pula.

Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bagi Propinsi Jawa Tengah, otonomi daerah merupakan tantangan yang tidak ringan. Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam memberdayakan

masyarakat, lembaga ekonomi, politik, hukum, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI. Di sisi lain kemampuan keuangan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam rangka desentralisasi kepada setiap daerah dituntut untuk dapat membiayai diri sendiri (daerah sendiri) melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peran pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2001: 8).

Daerah yang didasari atas kesadaran bahwa peluang bagi daerah untuk membuktikan kemandiriannya. Otonomi daerah harus diarahkan pada keberhasilannya dengan dukungan pendanaan yang memadai melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah tidak dapat dipungkiri lagi harus menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Maka melalui pengelolaan keuangan daerah, selain bertujuan untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan, juga ditujukan bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu argumen dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam



menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya (Suwandi, 2000). Rendahnya kemampuan keuangan daerah sering menimbulkan siklus negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada gilirannya akan mengundang campur tangan pusat, atau bahkan dapat menyebabkan dialihkannya sebagian fungsi-fungsi pemerintah daerah ke tingkat pemerintahan yang lebih atas.

Hal tersebut dapat dilihat dari Propinsi Jawa Tengah yang memiliki 35 Daerah Tingkat II yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota memiliki penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintahan yang masing-masing berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya, yang mana setiap pengeluaran pemerintah yang dilakukan berdasarkan kepemilikan pendapatan yang berupa penerimaan dari potensi-potensi daerah, atau yang lebih dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah yang antara lain komponen komponennya terdiri dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, penerimaan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan lain-lainnya yang sah. Akan tetapi ada fakta bahwa daerah tidak akan mampu membiayai pengeluarannya baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan jika hanya menggandakan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk pemberian bantuan dalam keuangan pemerintah daerah dengan dana perimbangan.

Dana perimbangan termuat pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa transfer dari pemerintah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana bagi hasil digunakan

untuk pelaksanaan kewenangan Pemda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Saragih (2003), dana bagi hasil berperan sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagihasilkan. DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antardaerah (fiscal equalization) di Indonesia. Sedangkan DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat. Diluar dari ketiga fungsi tersebut, untuk secara detailnya, penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Dana perimbangan tersebut diberikan sesuai dengan potensi daerah masing-masing atau arti lainnya daerah yang satu tidak sama dengan daerah lainnya, makin besar potensi daerah tersebut maka semakin besar dana perimbangan yang diberikan untuk melakukan pengeluarannya yang kita ketahui berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, seperti contohnya adalah pada tahun 2007 Kabupaten Cilacap yang merupakan Kota yang memiliki sumber daya alam berupa minyak yang cukup banyak mempunyai tingkat pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 1.067.102.839.000 dengan tingkat PAD sebesar Rp. 82.143.538.000 mendapatkan dana perimbangan sebesar Rp. 1.024.420.644.000. Hal tersebut kita bandingkan dengan Kabupaten Sragen yang memiliki pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 701.934.395.000 dengan jumlah PADnya sebesar Rp. 65.157.983.000 dan

dana perimbangannya sebesar Rp. 740.548.294.000, yang mana Kabupaten Sragen ini tidak memiliki potensi daerah yang besar atau dalam arti lainnya tidak memiliki sumber daya alam yang potensial, selain itu jumlah penduduknya juga terpaut jauh, apabila di Kabupaten Cilacap memiliki jumlah penduduk sebesar 1.608.488 jiwa di Kabupaten Sragen hanya sebesar 844.893 jiwa (www.bkbn.co.id, 2007).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai pengeluaran pemerintah 35 Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah. Beberapa variabel tersebut diduga mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai pengeluaran pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis dalam penulisan skripsi ini memilih judul : ” **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DI PROPINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN ANGGARAN 2005-2007** ”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam pemecahan suatu masalah, mengetahui rumusan masalah merupakan suatu langkah yang harus dilakukan, langkah tersebut sangat penting sebagai landasan dalam menyikapi permasalahan tersebut dimasa yang akan datang, baik untuk mengantisipasi ataupun mengendalikan. Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan masalah, yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh tingkat PAD dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah.
2. Seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah.
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah.
4. Seberapa besar pengaruh tingkat PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah.

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisa pengaruh PAD dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2005-2007.
- b. Untuk menganalisa pengaruh Dana Perimbangan dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2005-2007.
- c. Untuk menganalisa pengaruh Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2005-2007.

- d. Untuk menganalisa pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni memberikan informasi dan gambaran kepada pembaca mengenai seberapa besar pengaruh dari variabel-fiskal dan non-fiskal, yaitu variabel PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di 29 Kabupaten dan 6 Kota di daerah Jawa Tengah pada periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2007, dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai langkah pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan tentang langkah yang diambil dalam menentukan kebijakan fiskalnya (keuangan). Bagi penulis penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dibanku kuliah serta sebagai prasyarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Otonomi Daerah**

Salah satu produk reformasi adalah ditetapkannya otonomi daerah (Otda) melalui penetapan UU Nomor 22/1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Otda tersebut telah dirancang untuk mengoreksi pola pembangunan yang sentralistik sebagaimana di praktekkan selama Orde Baru. UU ini juga di rancang sebagai langkah peningkatan partisipasi dan tanggung jawab daerah dalam proses pembangunan di daerahnya sendiri dalam kerangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan (Yulistio, 2004).

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan (Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Pengertian otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Dengan demikian pengertian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas lagi adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

Hakikat Otonomi Daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui pendekatan lembaga perwakilan sebagai personifikasi. Desentralisasi adalah pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat oleh pemerintah daerah. (Yulistio, 2004) mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab secara sistematis dan rasional dari pemerintah pusat kepada pemerintahan yang secara vertikal ada di bawahnya

atau kepada lembaga lokal dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi pada kasus negara kesatuan.

Selain definisi atau batasan desentralisasi tadi, definisi yang khas Indonesia tercantum dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 (UU 22/99) tentang Pemerintahan Daerah. Pada Bab 1 tentang Ketentuan Umum UU ini, paling sedikit, ada tiga definisi yang menunjukkan penyerahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketiga definisi tersebut adalah:

- a. *Desentralisasi* adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah otonom yang dimaksudkan di sini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.
- b. *Dekonsentrasi* adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau perangkat pusat di daerah.
- c. *Tugas Pembantuan* adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa, untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan



mempertanggung jawabkannya kepada pihak yang menugaskan (Yulistio, 2004)

Asas desentralisasi memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan dalam segala bidang. Dalam otonomi yang bertanggung jawab dan sebagai perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah.

Otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah (PAD), sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom. Terpusatnya SDM berkualitas di kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, karena kegiatan pembangunan akan bergeser dari pusat ke daerah. Menguatnya isu Putra Daerahisme dalam pengisian jabatan akan

menghambat pelaksanaan otonomi daerah, disamping itu juga akan merusak rasa persatuan dan kesatuan yang telah kita bangun bersama sejak jauh hari sebelum Indonesia merdeka (Soenarto, 2001)

Otonomi Daerah. UU 1/1945 menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil. UU 22/1948 memberikan hak otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah. Selanjutnya UU 1/1957 menganut sistem otonomi riil yang seluas-luasnya. Kemudian UU 5/1974 menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung. Sedangkan saat ini di bawah UU 22/1999 dianut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Otonomi Daerah yang dilaksanakan saat ini adalah Otonomi Daerah yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU ini, otonomi daerah dipahami sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DPRD di tingkat kabupaten atau kotamadya ini bahkan memiliki kekuasaan yang lebih besar ketimbang DPRD di tingkat propinsi, karena berhak memilih, meminta pertanggungjawaban serta memberhentikan Bupati atau Walikota, tanpa persetujuan dari propinsi atau pemerintah pusat. Sementara Gubernur, meski dipilih oleh DPRD tingkat propinsi, penunjukan serta pemberhentiannya masih memerlukan persetujuan Presiden, karena Gubernur tetap merupakan wakil pemerintah pusat, disamping sebagai kepala daerah.

Di tingkat kabupaten atau kotamadya benar-benar menjadi penentu jatuh bangun pembangunan di daerah masing-masing. Jika pemerintah daerah gagal merencanakan, melaksanakan serta mengawasi pembangunan di daerahnya, maka ini akan menjadi beban kesalahannya yang harus dipertanggungjawabkan di depan DPRD. Namun sebaliknya, pemerintah-pemerintah daerah dapat saling bersaing mendongkrak angka pertumbuhan pembangunan di daerah masing-masing, sesuai dengan kemampuannya mengelola sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada, tanpa perlu terkendala oleh berbagai aturan yang membelenggu dari pusat.

Pemerintah daerah perlu mengedepankan kemampuan membangun kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat mendesain standard Pelayanan Publik yang mudah, murah dan cepat. Untuk menciptakan kelembagaan pemerintah daerah otonom yang mumpuni perlu diisi oleh SDM yang kemampuannya tidak diragukan, sehingga merit system perlu dipraktekkan dalam pembinaan SDM di daerah. Untuk dapat mewujudkan prospek Otonomi Daerah di masa mendatang tersebut diperlukan suatu kondisi yang kondusif, diantaranya yaitu :

- a. Adanya komitmen politik dari seluruh komponen bangsa terutama pemerintah dan lembaga perwakilan untuk mendukung dan memperjuangkan implementasi kebijakan Otonomi Daerah.
- b. Adanya konsistensi kebijakan penyelenggara negara terhadap implementasi kebijakan Otonomi Daerah.

- c. Kepercayaan dan dukungan masyarakat serta pelaku ekonomi dalam pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Otonomi Daerah.
- d. Otonomi daerah propinsi bersifat terbatas, dalam arti hanya menangani urusan yang bersifat lintas kabupaten atau kotamadya. Propinsi akan terfokus peranannya dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat yang didekonsentrasi, melaksanakan peran sebagai pemelihara hubungan antar pusat dan daerah, sehingga akan banyak melakukan fungsi supervisi dan koordinasi terhadap kabupaten atau kotamadya.
- e. DPRD makin nyata peranannya, baik sebagai lembaga legislasi maupun sebagai badan pengawas.
- f. Kepala daerah dicalonkan, dipilih dan ditetapkan serta bertanggung jawab pada DPRD
- g. Peraturan Daerah (perda) tidak perlu disahkan oleh pemerintah pusat.
- h. Daerah ikut mengatur sumberdaya alam (antara lain pertambangan kecil dan menengah)
- i. Tidak ada lagi organisasi pemerintahan yang seragam bagi semua daerah.
- j. Daerah mempunyai kewenangan lebih luas dalam mengatur tata kepegawaian daerah.
- k. Daerah akan mempunyai sumber-sumber keuangan yang lebih menjamin semakin tersedianya sumber-sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
- l. Pengawasan oleh pusat yang bersifat intervensi terutama dalam bentuk pengawasan preventif, sejauh mungkin dihindarkan. Pengawasan pusat

hanya dalam bentuk represif terhadap Perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang membahayakan keutuhan negara.

- Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam UU 22/1999 adalah :
  - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
  - b. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
  - c. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
  - d. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah.
  - e. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi wilayah administratif.
  - f. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - g. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan

pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

- h. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya

Pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Dari *aspek ideologi*, sudah jelas dinyatakan bahwa Pancasila merupakan pandangan, falsafah hidup dan sekaligus dasar negara. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan antara lain pengakuan Ketuhanan, semangat persatuan dan kesatuan nasional, pengakuan hak azasi manusia, demokrasi, dan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Jika kita memahami dan menghayati nilai-nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Otonomi Daerah dapat diterima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Otonomi Daerah nilai-nilai luhur Pancasila tersebut akan dapat diwujudkan dan dilestarikan dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Dari *aspek politik*, pemberian otonomi dan kewenangan kepada Daerah merupakan suatu wujud dari pengakuan dan kepercayaan Pusat kepada Daerah. Pengakuan Pusat terhadap eksistensi Daerah serta kepercayaan

dengan memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah akan menciptakan hubungan yang harmonis antara Pusat dan Daerah. Selanjutnya kondisi akan mendorong tumbuhnya dukungan Daerah terhadap Pusat dimana akhirnya akan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijakan Otonomi Daerah sebagai upaya pendidikan politik rakyat akan membawa dampak terhadap peningkatan kehidupan politik di Daerah.

Dari *aspek ekonomi*, kebijakan Otonomi Daerah yang bertujuan untuk pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan bagi Daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, daerah akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan. Kewenangan daerah melalui Otonomi Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal, nasional, regional maupun global.

Dari *aspek sosial budaya*, kebijakan Otonomi Daerah merupakan pengakuan terhadap keanekaragaman Daerah, baik itu suku bangsa, agama, nilai-nilai sosial dan budaya serta potensi lainnya yang terkandung di daerah. Pengakuan Pusat terhadap keberagaman Daerah merupakan suatu nilai penting bagi eksistensi Daerah. Dengan pengakuan tersebut Daerah akan merasa setara dan sejajar dengan suku bangsa lainnya, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya mempersatukan bangsa dan negara. Pelestarian dan

pengembangan nilai-nilai budaya lokal akan dapat ditingkatkan dimana pada akhirnya kekayaan budaya lokal akan memperkaya khasanah budaya nasional.

Selanjutnya dari *aspek pertahanan dan keamanan*, kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk memantapkan kondisi Ketahanan daerah dalam kerangka Ketahanan Nasional. Pemberian kewenangan kepada Daerah akan menumbuhkan kepercayaan Daerah terhadap Pusat. Tumbuhnya hubungan dan kepercayaan Daerah terhadap Pusat akan dapat mengeliminir gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Pendapatan Asli Daerah**

Sistem pemerintahan menekankan pada otonomi daerah maka kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerahlah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan mengelolanya untuk kepentingan daerah pula.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan indikator penting dalam mengukur tingkatan otonomi daerah. Sumber keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber non Pendapatan Asli Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dapat dicapai apabila sumber keuangan daerah dapat membiayai aktifitas daerah yang berasal dari PAD (Yudoyono, 2003: 45).



Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Tanpa adanya dana yang cukup, maka ciri pokok dari otonomi daerah menjadi hilang. Meskipun daerah juga mendapatkan sumber-sumber dari PAD, namun PAD mempunyai peranan yang strategis di dalam keuangan daerah karena bagi suatu daerah sumber pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga kehidupan daerah. Oleh karena itu para ahli sering memakai PAD sebagai alat analisis dalam menilai tingkat otonomi suatu daerah.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai keuangan dengan otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya tentu membutuhkan dana. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya faktor keuangan untuk melaksanakan otonomi daerah, karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, sehingga membutuhkan sumber keuangan yang memadai untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggali sumber PAD, dengan tujuan agar ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan keuangan daerah yang penting adalah “wewenang di tepi” artinya memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup. Jika penerimaan PAD telah mencapai 20% dari pengeluaran daerah, maka sumber keuangan daerah sudah dapat dikatakan cukup, sehingga ketrgantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat kecil. Jadi semakain besar prosentase PAD terhadap pengeluaran daerah, maka otonomi daerah dapat dikatakan semakin baik. Agar

supaya daerahh dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Namun mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Kaloh, 2004: 17).

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) hasil pajak daerah.
- 2) hasil retribusi daerah.
- 3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- 4) lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  - a. dana perimbangan.
  - b. pinjaman daerah, dan
  - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 1999).

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, diantaranya menggariskan sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah secara umum adalah pembayaran/iuran dari rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan balas jasa secara langsung, misal: pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan sebagainya.

b. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi tidaklah sama dengan pengertian pajak. Perbedaan yang jelas antara retribusi dengan pajak adalah mengenai ada tidaknya balas jasa dari pemerintah kepada individu. Dari perbedaan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa retribusi adalah suatu pembayaran/iuran dari rakyat kepada pemerintah dengan balas jasa secara langsung yang diterima dengan pembayaran retribusi tersebut. Misalnya uang sekolah, uang langganan air minum, uang langganan listrik dan sebagainya.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Laba perusahaan daerah diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh karena itu batas-batas tertentu pengolahan perusahaan harus bersifat profesional dan harus berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi.

Dalam penjelasan umum Undang-undang No. 5 Tahun 1974, pengertian perusahaan daerah dirumuskan sebagai berikut: yaitu suatu badan saha yang dibentuk oleh daerah untuk perkembangan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Dari kutipan di atas terdapat dua fungsi pokok, yakni sebagai dinamisator perekonomian daerah dan sebagai penghasilan daerah.

d. Penerimaan dari Dinas-dinas

Dinas-dinas daerah bertugas dan berfungsi untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa memperhatikan untung/rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi dalam bidang pelayanan jasa.

Sekalipun dinas-dinas daerah telah ditempatkan sebagai salah satu sumber PAD, tetapi tidak berarti sumbangan riil yang diberikan sektor ini cukup besar untuk menopang keuangan daerah pada umumnya. Karena dalam kenyataannya, sektor ini hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan sektor perusahaan daerah dalam memberikan kontribusi bagi PAD dan pendapatan daerah pada umumnya.

e. Penerimaan Lain-lain

Penerimaan lain-lain adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah selain yang disebutkan diatas. Penerimaan lain-lain ini merupakan penerimaan daerah yang sah (yaitu dengan peraturan daerah) yang diperoleh dari penjualan-penjualan milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor dan cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa giro (kas daerah), biaya pembinaan dan penyewaan tempat pelelangan ikan dan lain-lain.

UU No. 22 Tahun 1999 kewenangan pengelolaan keuangan daerah diberikan secara luas kepada daerah, karena daerah yang tahu tentang persoalan yang ada di daerah, kondisi ini merupakan peluang bagi daerah untuk memperlihatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah

tanpa banyak campur tangan pemerintah tingkat atas (Halim, 2001 : 9) dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah maka suatu daerah membutuhkan biaya dan biaya itu harus dipikul oleh masing-masing daerah yang menyelenggarakan peraturan dan pengurusan. Jadi mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri adalah atas biaya sendiri pula. Untuk keperluan tersebut suatu daerah harus mempunyai kas (keuangan) tersendiri, yang terpisah dengan keuangan pemerintah pusat, untuk membiayai berbagai pengeluaran untuk menyelenggarakan tugas perbantuan. Semakin luas dan rumitnya urusan yang diselenggarakan akan semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu prinsip-prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 5 Tahun 1974, perpajakan umum No. 1 sub e, menghendaki kesanggupan keuangan yang sebesar-besarnya pula bagi tiap-tiap daerah.

Tiap daerah harus mempunyai sumber-sumber pendapatan tertentu untuk mengisi kasnya. Begitu pula bagi pemerintah pusat untuk keperluan pemerintah, negara harus mempunyai keuangan tersendiri beserta sumber-sumbernya. Oleh karena itu, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya mengenai pembagian sumber-sumber keuangan, masing-masing haruslah diatur sebaik-baiknya agar dapat terpelihara keseimbangan keuangan yang harmonis dan tepat.

UU No. 32 Tahun 1957 memuat tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Adapun maksud dan tujuan UU perimbangan keuangan ini adalah:

- a. Memberikan ketentuan sekedar menjamin keuangan daerah
- b. Mendorong ke arah penyehatan rumah tangga daerah
- c. Mendorong daerah untuk mengintensifkan sumber-sumber pendapatan daerah dan mengadakan sumber-sumber baru
- d. Memupuk rasa tanggung jawab daerah dalam menyelenggarakan kebijakan keuangan untuk melakukan tugas daerah (Yudoyono, 2003: 29)

Sejalan dengan dinamika dan tuntutan perubahan di segala bidang maka untuk mengantisipasi kesalahan masa lalu, UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah diperkirakan akan memberikan angin segar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat dan daerahnya sendiri. (Halim, 2001 : 307-308).

### C. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. (Mangkoesebroto, 1993 : 169) apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu tentang Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” (Kaloh, 2004 : 20) .

(Bailey 1995 : 43) membagi teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Model makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara *particular* komponen-komponen pengeluaran pemerintah.

(Mangkoesebroto, 1993 : 169) teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.
2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah.
3. Teori Peacock & Wiseman.

Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, (Mangkoesoebroto, 1993: 170) bahwa pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

### **1. Hukum Wagner**

Teori Wagner tentang perkembangan pengeluaran pemerintah disebut sebagai *Wagner law of increased government activity*. Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkoesoebroto, 1993 : 170).



Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

## 2. The Displacement Effect

Dari ketiga teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah tersebut, teori Peacock & Wiseman dianggap sebagai teori dan model yang terbaik (Mangkoesobroto, 1993 : 173). Teori mereka sering disebut sebagai *The Displacement Effect*, dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. (Mangkoesobroto, 1993 : 173) Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak. (Mangkoesobroto, 1993 : 173) : *“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.”*

Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi berbentuk seperti tangga.

#### **D. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DHB), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), selain ditujukan untuk konsolidasi desentralisasi fiskal dan memperkecil ketimpangan keuangan antara pusat dan daerah serta antar daerah dengan tetap menjaga netralitas fiskal, juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan daerah.

##### **1. Dana Bagi Hasil**

Dana bagi hasil merupakan bagian daerah yang bersumber dari penerimaan yang dihasilkan daerah, seperti penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan PPh 25/29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Di samping itu, dana bagi hasil juga berasal dari sumber daya alam (SDA), seperti minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Dengan demikian, daerah yang potensi penerimaannya tinggi, baik itu berupa pajak maupun sumber daya alam, akan dapat menikmati pendapatan yang lebih baik. Besarnya bagian daerah tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **2. Dana Alokasi Umum**

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No. 25 Tahun 1999, besarnya dana alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan

dalam negeri bersih, yaitu penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan DAK yang bersumber dari dana reboisasi. DAU diberikan kepada daerah-daerah dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan antar daerah berdasarkan pertimbangan bahwa potensi fiskal dan kebutuhan dari masing-masing daerah berbeda.

### **3. Dana Alokasi Khusus**

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mengisi kesenjangan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, khususnya bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah. Hal ini dimaksudkan selain untuk secara bertahap dapat diarahkan untuk mencapai keserasian tingkat pelayanan publik di berbagai wilayah, juga dapat mengarahkan sebagian dari pengeluaran daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas nasional.

## **E. Penduduk**

Indonesia termasuk negara yang paling banyak jumlah penduduknya. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan jumlah penduduk ini penting sekali di Indonesia. Kalau di masa depan jumlah ini mau jadi lebih banyak lagi, pasti ada lebih banyak masalah sosial lagi. (Anwar, 2001 : 36) menyatakan bahwa kelahiran dan perpindahan penduduk disuatu wilayah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan. Sedangkan kematian menyebabkan

berkurangnya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau negara dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk awal (misal  $P_0$ ) dengan jumlah penduduk dikemudian hari (misal  $P_t$ ). Tingkat pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus secara geometrik yaitu dengan menggunakan dasar bunga-berbunga (bunga majemuk).

Dengan rumus pertumbuhan geometrik, angka pertumbuhan penduduk ( *rate of growth* atau  $r$  ) sama untuk setiap tahun, rumusnya:

$$P_t = P_0 (1+r)^t$$

Dimana :  $P_0$  adalah jumlah penduduk awal

$P_t$  adalah jumlah penduduk t tahun kemudian

$r$  adalah tingkat pertumbuhan penduduk

$t$  adalah jumlah tahun dari 0 ke  $t$ .

Interprestasi hasil perhitungan, misalnya angka pertumbuhan penduduk Indonesia antara tahun 1995-2000 adalah 1,11 % per tahun. Artinya setiap tahun antara 1995 dengan tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia bertambah sebesar 1,11 persen nya. Dengan angka pertumbuhan ini dapat dihitung perkiraan jumlah penduduk pada tahun yang akan datang.

Anwar, (2001 : 39) menyatakan bahwa penduduk tinggal di berbagai daerah yang disebut dengan persebaran penduduk atau distribusi penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif, disamping itu ada persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal yakni desa dan kota. Secara geografis, penduduk Indonesia tersebar di beberapa pulau

besar dan pulau-pulau atau kepulauan. Kepadatan penduduk berkaitan dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah. Indikator yang umum dipakai adalah Rasio Kepadatan Penduduk (*density ratio*) yaitu rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada tahun tertentu, rumusnya:

$$\text{Rasio Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlahpenduduk}}{\text{luaswilayah}(km^2)}$$

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian empiris para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya didasari dari beberapa literatur, yang antara lain yaitu:

1. Udjianto (2003), mengatakan daerah tingkat II merupakan daerah otonom yang mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana dari pembangunan, maka titik berat otonomi diletakkan pada daerah tingkat II dengan pertimbangan bahwa daerah tingkat II yang lebih berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat. Salah

satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah melihat posisi keuangannya. Posisi keuangan daerah dapat dilihat dari APBD, yang merupakan perencanaan keuangan daerah dan menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran daerah untuk membiayai semua kegiatan pembangunan dalam setiap tahun anggaran. Dana untuk membiayai pembangunan daerah pada garis besarnya berasal dari dua sumber yaitu (1) penerimaan dari negara yang dalam RAPBD disebut pendapatan berasal dari pemerintahan daerah / instansi yang tertinggi dan (2) pendapatan dari daerah itu sendiri yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Nugroho (2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengeluaran pemerintah di DIY serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode perhitungan fixed effect yang disertai dengan variabel dummy, guna mengukur derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Untuk mencari hubungan antara derajat desentralisasi fiskal yang diukur dengan pendekatan pengeluaran dan kebijakan desentralisasi fiskal tahun 2001 dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta menempatkan variabel pertumbuhan ekonomi yang diamati melalui persentase pertumbuhan PDRB riil perkapita kabupaten/kota sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen terdiri dari derajat distorsi ekonomi, pertumbuhan angkatan kerja, *inflation rate*, derajat desentralisasi fiskal yang

diamati melalui sisi pengeluaran, variabel *dummy* tahun kebijakan desentralisasi tahun 2001, dan variabel *dummy* krisis ekonomi tahun 1998.

Dimana penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu:

- a. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta adalah variabel tingkat inflasi dan variabel *dummy* krisis ekonomi. Dimana keduanya berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi D.I.Yogyakarta rentan terhadap fluktuasi ekonomi.
- b. Variabel derajat desentralisasi fiskal menunjukkan nilai koefisien yang positif, namun tidak signifikan secara statistik. Hal ini bertentangan dengan hipotesa penelitian yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal berhubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teori, semakin besar pengeluaran pemerintah daerah dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penelitian dengan studi kasus Kabupaten/Kota di Propinsi D.I.Y didapat kenyataan bahwa pengeluaran pemerintah daerah belum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini diduga karena pengeluaran pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Propinsi D.I. Yogyakarta belum dilakukan secara efisien. Selain itu diperlukan adanya skala prioritas dalam mengalokasikan pengeluaran daerah. sehingga pengeluaran pemerintah daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

- c. Variabel *dummy* kebijakan fiskal tahun 2001 menunjukkan hasil yang positif namun tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi tingkat pertumbuhan PDRB riil perkapita di kabupaten/kota di Propinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini berarti tidak ada hubungan secara statistik antara penerapan kebijakan desentralisasi fiskal tahun 2001 dengan pertumbuhan ekonomi daerah penelitian. Sehingga tidak dapat disimpulkan apakah pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Propinsi D.I.Y semakin tinggi ataukah terjadi penurunan setelah kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan pada tahun 2001. Selama ini terjadi kekhawatiran bahwa dengan kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka otonomi daerah akan menyebabkan terjadinya kompetisi fiskal antar daerah. Dimana setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan retribusi. Peningkatan pajak dan retribusi yang tidak dilakukan dengan hati-hati akan mendorong terjadinya ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya menyebabkan lesunya kegiatan investasi dimana hal tersebut akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu diperlukan kehati-hatian bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Jangan sampai terjadi keinginan untuk meningkatkan PAD justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Azwar (2000), dalam studinya mengenai penerimaan pajak menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat ditempuh dengan 3 jalan, yaitu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya;



meningkatkan akuntabilitas pemerintah; dan meningkatkan penerimaan melalui pajak daerah. Akuntabilitas Pemerintah: Desentralisasi diyakini merupakan suatu kebijakan yang dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal itu disebabkan oleh keyakinan bahwa kebijakan desentralisasi mampu mengurangi korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Seperti telah disebutkan di atas bahwa pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan kebijakan terutama kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Peningkatan Penerimaan Daerah: Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, maka pemerintah dapat menaikkan penerimaannya melalui sektor pajak. Masyarakat tidak akan berkeberatan membayar untuk mendapatkan barang atau jasa publik yang sesuai dengan yang mereka butuhkan, pemerintah daerah diyakini lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di wilayahnya daripada pemerintah pusat.

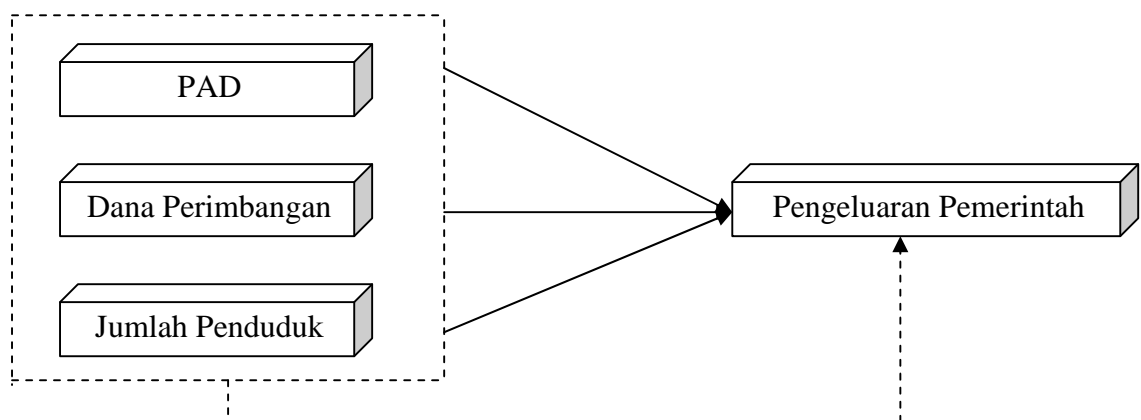
4. Imansyah (2005), dalam studinya tentang perkembangan ekonomi di Indonesia menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi dibahas hampir di semua sektor yaitu sektor riil, sektor finansial, sektor eksternal dan sektor pemerintah. Khusus untuk investasi domestik dan asing diperoleh kesimpulan ada meningkat setelah berfluktuasi pada kurun waktu tahun sebelumnya. Nilai persetujuan investasi asing USD 6,835.6 juta pada triwulan keempat 2003. Sementara nilai persetujuan investasi domestik adalah Rp 32,280.1 milyar. Peningkatan persetujuan ini menunjukkan tingginya minat para investor untuk melakukan

investasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh membaiknya berbagai indikator ekonomi makro dan berbagai upaya pemerintah untuk menciptakan perbaikan iklim investasi, terutama untuk menarik investasi asing mengenai penanaman modal.

5. Sitompul (2006), dalam penelitiannya mengenai pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB Sumatera Utara menyimpulkan bahwa pengaruh investasi, baik PMDN maupun PMA terhadap PDRB, dimana investasi tersebut juga akan menyerap sejumlah tenaga kerja sehingga menjadi produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, jumlah tenaga kerja dan kondisi perekonomian Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi terhadap PDRB Sumatera Utara. Investasi PMDN tahun sebelumnya, investasi PMA tahun sebelumnya dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB Sumatera Utara.

### G. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



Keterangan:

----- = Variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen

————— = Variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen

## H. Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap besaran pengeluaran pemerintah 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.
2. Diduga Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap besaran pengeluaran pemerintah 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.
3. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap besaran pengeluaran pemerintah 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.
4. Diduga faktor yang paling dominan adalah tingkat Dana Perimbangan daripada PAD dan Jumlah Penduduk dalam menentukan nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi. Teknik regresi menurut pendapat Sudjana (1998 : 144) adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mencari ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau mencari hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Alasan dipilihnya teknik regresi, sebab penelitian ini bertujuan untuk mencari ada tidaknya pengaruh antara tiga variabel, yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah..

#### **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku dan jurnal serta sumber-sumber lain yang mendukung dan relevan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersifat kuantitatif yang diperoleh dari laporan historis yang telah dikumpulkan, diolah, dianalisa, disajikan oleh pihak lain, yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

### **C. Definisi Operasional Variabel** 39

#### 1. Jumlah Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah merupakan total dari semua belanja yang dilakukan oleh pemerintah baik berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang diukur dengan satuan uang/rupee.

#### 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (UU22/1999). PAD adalah sesuatu yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dapat diukur dengan uang/rupee karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### 3. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan diukur dengan satuan rupiah.

#### 4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di suatu daerah tanpa di bedakan mana yang angkatan kerja maupun yang bukan. Jumlah Penduduk dapat dihitung dengan satuan jiwa.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Teknik kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari literatur serta bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga memperoleh landasan teori yang memadai.

#### 2. Teknik dokumentasi

Metode ini bertujuan untuk mencari data-data yang sudah tersedia pada waktu yang lalu dengan membuka arsip-arsip data berupa laporan pendapatan kota atau daerah yang ada di Indonesia.

### E. Teknik Analisis Data

#### 1. Metode Data Panel

Data dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah data yang menggabungkan observasi lintas sektor (*cross-section*) dan runtun waktu (*time – series*) sehingga mengakibatkan jumlah observasi meningkat . Peningkatan jumlah observasi ini dapat menjadi solusi bagi kendala yang dihadapi dalam

penelitian, yaitu jumlah observasi yang tidak mencukupi ketika diestimasi dengan runtun waktu atau observasi yang terlalu sedikit ketika diestimestimasi dengan data lintas sektor untuk menghasilkan estimasi yang efisien .

Gujarati (2003 : 425) berpendapat bahwa data panel adalah catatan nilai variabel-variabel yang diambil dalam jangka waktu tertentu dari suatu kelompok target sampel (panel) yang telah ditentukan. Variabel-variabel tersebut bisa berupa keadaan atau aksi yang dilakukan oleh panel yang dapat berubah seiring dengan waktu. Dengan kata lain data panel adalah gabungan dari *cross-sectional data* dan *time series data*.

Menurut Gujarati (2003: 515) ada beberapa keuntungan menggunakan panel data :

- a. *Heterogeneity* sebab dapat berhubungan dengan individu, perusahaan, negara, daerah, dan lain-lain pada waktu tertentu.
- b. Lebih informatif, bervariasi, *degree of freedom* lebih besar dan lebih efisien
- c. Menghindari masalah multikolinearitas
- d. Lebih unggul dalam mempelajari perubahan dinamis
- e. Lebih dapat mendeteksi dan mengukur pengaruh-pengaruh yang tidak dapat diobservasi pada data lintas sektor klas tempat (*cross-section*) murni atau runtun waktu (*time-series*) murni
- f. Dapat digunakan untuk mempelajari *behavioral model* (model perilaku).
- g. Meminimisasi bias yang dihasilkan oleh individu atau perusahaan karena unit data lebih banyak.

Regresi dengan menggunakan panel data, memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan standar *cross section* dan *time series*. (Gujarati, 2003: 527) menyatakan ada beberapa keunggulan regresi dengan data panel. Penggunaan panel data dalam penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis *cross section* maupun *time series*, yaitu:

- a. **Pertama**, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degree of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien.
- b. **Kedua**, data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja.
- c. **Ketiga**, data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*

#### Data panel

Gujarati (2003: 637) menjelaskan bahwa data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di-survey dalam beberapa waktu.

Data panel dalam penelitian ini adalah *balanced panel*, maksudnya data *cross-section* yang sama diobservasi menurut waktu adalah 31 propinsi yang ada di Indonesia dan dalam *time series* yang sama pula, yaitu tahun 2005-2006.



Dengan demikian ada 31 *cross-sectional* unit dan 2 periode waktu, sehingga secara keseluruhan ada 62 observasi, disusun seperti biasa (*stacking*).

Searah dengan pendapat Gujarati (2003 : 641-643) di atas dan berdasarkan semua koefisien berbeda menurut waktu dan individual, regresi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencari pengaruh tingkat PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk dalam menentukan besaran nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah.

## 2. Estimasi Model Data Panel

### a. Pendekatan Kuadrat Terkecil (*Pooled Least Square/Common Effect*)

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan menggunakan metode PLS dikenal dengan Estimasi Common Effect. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu . Diasumsikan bahwa perilaku data antar variabel sama dalam berbagai kurun waktu.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \dots \dots \dots \text{pers. ( 3.1 )}$$

Untuk  $i = 1, 2, \dots, N$  dan  $t = 1, 2, \dots, T$

dimana  $i$  adalah *cross – section identifiers* dan  $t$  adalah *time - series identifiers*.

### b. Pendekatan Effect Tetap (*Fixed Effect*)

Kesulitan terbesar dalam pendekatan metode kuadrat terkecil biasa adalah asumsi *intersep* dan *slope* dari persamaan regresi yang dianggap konstan baik antar daerah maupun antar waktu. Asumsi ini sangat ketat dan

mungkin tidak beralasan. Satu cara untuk memperhatikan ” ke – khas-an ” unit *cross – section* atau unit *time – series* adalah dengan memasukkan variabel boneka ( *dummy variabel* ) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda – beda , baik lintas unit *cross – section* maupun unit waktu.

Pendekatan yang paling sering dilakukan adalah dengan mengizinkan *intercept* bervariasi antar unit *cross – section* namun tetap mengasumsikan bahwa slope koefisien adalah konstan antar unit *cross – section*. Pendekatan ini dimana *slope coefficient constant but intercept varies across individuals* , dalam literatur dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect model / FEM*). Kita dapat menuliskan pendekatan tersebut dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \dots \dots \dots \text{pers. ( 3.2 )}$$

Perhatikan bahwa kini kita menambahkan *subscript* *i* pada intersep yang menandakan bahwa intersep antar individu mungkin berbeda.

Istilah *Fixed Effect* datang dari kenyataan bahwa walaupun intersep mungkin berbeda antar individu , namun *intercept* tersebut tidak bervariasi sepanjang waktu ; dengan kata lain *time invariant* . Jika kita menulis intersep sebagai  $\alpha_{it}$  , berarti intersep tiap individu adalah *time variant* . Disamping itu model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi ( *slope* ) tetap antar individu dan antar waktu.

Untuk mengestimasi model *Fixed Effect* dimana intersep berbeda antar individu digunakan metode teknik variabel dummy untuk menjelaskan

perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini seringkali disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variabels (LSDV). Model Fixed Effect dengan teknik variabel dummy dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 D_{4i} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} \dots \dots \text{pers. (3.3)}$$

dimana

$D_{2i}$  = 1 untuk variabel 1

= 0 untuk variabel lainnya

Model LSDV ( persamaan 3.3 ) juga disebut sebagai model covarian.

### c. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect* )

Di dalam mengestimasi data panel dengan *fixed effect* melalui teknik variabel dummy menunjukkan ketidakpastian model yang kita gunakan. Untuk mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan variabel residual yang dikenal dengan model *random effect* . Didalam model ini kita akan memilih estimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

Di dalam menjelaskan *random effect* diasumsikan setiap variabel mempunyai perbedaan intersep. Namun demikian , kita mengasumsikan bahwa intersep adalah variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individual variabel yang kita ambil sebagai sampel adalah dipilih secara *random* dan merupakan wakil dari populasi.

Untuk menjelaskan model *random effect* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} \dots \dots \dots \text{pers. (3.4)}$$

Dengan asumsi bahwa variabel random dengan  $\beta_1$  ( tidak ada *subscript*  $i$  ).

Nilai intersep tiap individu adalah :

$$\beta_{1i} = \beta_1 + \varepsilon_i \dots\dots\dots \text{pers. (3.5)}$$

dimana  $i = 1, 2, \dots, N$  dan  $\varepsilon_i$  adalah *random error term* dengan nilai rata – rata nol dan varian  $\sigma^2_{\varepsilon}$ .

Dengan mensubstitusikan persamaan (3.5) ke dalam (3.4) didapatkan persamaan :

$$\begin{aligned} Y_{it} &= \beta_{1i} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_i + \mu_{it} \\ &= \beta_{1i} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \omega_{it} \dots\dots\dots \text{pers. (3.6)} \end{aligned}$$

dimana,

$$\omega_{it} = \varepsilon_i + \mu_{it}$$

$\omega_{it}$  terdiri dari dua komponen error yaitu  $\varepsilon_i$  yang merupakan error variasi unit dan  $\mu_{it}$  adalah error dari kombinasi runtun waktu dari lintas sektor. Asumsi ECM ( *Error Correction Model* ) adalah :

$$\begin{aligned} \varepsilon_i &\sim N(0, \sigma^2_{\varepsilon}) \\ \mu_{it} &\sim N(0, \sigma^2_{\mu}) \dots\dots\dots \text{pers. (3.7)} \end{aligned}$$

$$E(\varepsilon_i, \mu_{it}) = 0 \qquad E(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0 \qquad (i \neq j)$$

$$E(\mu_{it}, \mu_{is}) = E(\mu_{it}, \mu_{jt}) = E(\mu_{it}, \mu_{js}) = 0 \qquad (i \neq j; t \neq s)$$

Error komponen tiap unit tidak berkorelasi satu sama lain dan tidak berkorelasi baik secara runtun waktu maupun lintas sektor.

Asumsi dalam (3.6) :

$$E(\omega_{it}) = 0 \dots\dots\dots \text{pers. (3.8)}$$

$$\text{Var}(\omega_{it}) = \sigma^2_{\varepsilon} + \sigma^2_{\mu} \dots\dots\dots \text{pers. (3.9)}$$

Jika  $\sigma_{\varepsilon}^2 = 0$  maka tidak ada perbedaan antara model (3.2) dan (3.3), dalam kasus ini dapat observasi pool sederhana (*cross – section dan time – series*) dan menggunakan regresi pooled, seperti pada (3.6).

Dalam (3.7) menunjukkan *error term*  $\omega_{it}$  homoskedastis. Ini dapat dilihat bahwa  $\omega_{it}$  dan  $\omega_{is}$  berkorelasi, yaitu error term memberikan unit cross – section pada waktu yang beda korelasi. Korelasi koefisien,  $\text{corr}(\omega_{it}, \omega_{is})$ , sebagai berikut :

$$\text{corr}(\omega_{it}, \omega_{is}) = \frac{\sigma_{\varepsilon}^2}{\sigma_{\varepsilon}^2 + \sigma_u^2} \dots\dots\dots \text{pers. (3.10)}$$

Jika tidak memperhitungkan korelasi ini dan diestimasi dengan OLS maka estimatornya akan tidak efisien. Metode yang biasanya dipakai adalah GLS.

### 3. Pemilihan Metode Estimasi Data Panel

#### a. PLS (*Pooled Least Square*) Atau FEM (*Fixed Effect Model*)

Uji restricted F digunakan untuk mengetahui teknik regresi data panel dengan *Fixed Effect* lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy. Dimana *restricted F – test* dirumuskan sebagai berikut :

$$F(m, n - k) = \frac{(R^2_{UR} - R^2_R) / m}{((1 - R^2_{UR}) / (n - k))} \dots\dots\dots \text{Pers. (3.11)}$$

dimana :

$R^2_{UR}$  = unrestricted

$R^2_R$  = restricted

m = jumlah "restricted"

k = total jumlah koefisien regresi ( termasuk konstanta )

n = jumlah sampel

Jika ternyata hasil perhitungan uji F stat  $\geq F ( m, n - k )$  ini berarti  $H_0$  ditolak, artinya intersep untuk semua unit *cross section* tidak sama. Dalam hal ini, akan digunakan *Fixed Effect* model untuk mengestimasi persamaan regresi.

**b. PLS ( Pooled Least Square ) Atau REM ( Random Effect Model )**

Untuk mengetahui apakah pendekatan *Random Effect* lebih baik dari pendekatan *Pooled Least Square* digunakan uji *Lagrange Multiplier ( LM )*. Uji signifikansi *random effect* ini dikembangkan oleh Bruesch – Pagan . Metode Bruesch – Pagan untuk uji signifikansi pendekatan *random effect* didasarkan pada nilai residual dari pendekatan PLS , untuk

$H_0$  : *Common Effect Model*

$H_a$  : *Random Effect Model*

Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut Bruesch dan Pagan dalam Green ( 2000 : 298 – 301 ):

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[ \frac{\sum_{i=1}^n \left[ \sum_{t=1}^T e_{it} \right]}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2 = \frac{nT}{2(T-1)} \left[ \frac{\sum_{i=1}^n (Te_i)^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

dimana  $n$  = jumlah *cross – section* ,  $T$  = jumlah *time – series* , dan  $e$  = residual pendekatan PLS.

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi – squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM lebih besar dari nilai kritis statistik *chi – squares* , maka hipotesis nul ditolak. Artinya , estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah dengan pendekatan *random effect*. Sebaliknya jika nilai LM lebih kecil daripada

nilai statistik chi – squares sebagai nilai kritis maka hipotesis nul diterima. Maka digunakan pendekatan PLS untuk regresi data panel.

**c. FEM ( *Fixed Effect Model* ) atau REM ( *Random Effect Model* )**

Beberapa pertimbangan teknis empiris yang dapat dijadikan panduan untuk memilih antara *fixed effect* atau *random effect* yaitu :

- 1) Bila T ( jumlah unit time series ) besar sedangkan N ( jumlah unit cross – section ) kecil , maka hasil FEM dan REM tidak jauh berbeda . Dalam hal ini pilihan umumnya akan didasarkan pada kenyamanan perhitungan yaitu FEM.
- 2) Bila N besar dan T kecil , maka hasil estimasi kedua pendekatan dapat berbeda secara signifikan . Jadi , apabila kita meyakini bahwa unit *cross – section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak ( random ) maka REM harus digunakan. Sebaliknya , apabila kita meyakini bahwa unit cross – section yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan FEM.
- 3) Apabila cross – section error component ( $\epsilon_i$  ) berkorelasi dengan variabel bebas X maka parameter yang diperoleh FEM tidak bias.
- 4) Apabila N besar dan T kecil , dan apabila asumsi yang mendasari REM dapat terpenuhi , maka REM lebih efisien dibandingkan FEM.

Keputusan penggunaan FEM atau REM dapat pula ditentukan dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausman. Spesifikasi ini akan memberikan penilaian dengan menggunakan *Chi – Square*

*Statistic* sehingga keputusan pemilihan model akan dapat ditentukan secara statistik. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 = \text{Random Effect Model}$

$H_a = \text{Fixed Effect Model}$

Hausman Test statistiknya ( Modul Lab. Ekonometrika , 2006 : 175 )

$$W = (\hat{\beta}_{fe} - \hat{\beta}_{re})' [v(\hat{\beta}_{fe}) - v(\hat{\beta}_{re})]^{-1} (\hat{\beta}_{fe} - \hat{\beta}_{re}) \approx X^{2(k)}$$

.....per (3.12)

Keterangan:

$W$  = Hasil uji Hausman

$\hat{\beta}_{fe}$  = *Fixed Effect Model*

$\hat{\beta}_{re}$  = *Fixed Effect Model*

$X^2$  = Hasil dikuadratkan

Bandingkan hasil dari Hausman test ini dengan *chi – squares statistic* dengan  $df = k$  , dimana  $k$  adalah jumlah variabel independen yang akan diestimasi . Jika hasil dari hausman test signifikan , maka  $H_0$  ditolak , yang berarti FEM digunakan.

#### 4. Pemilihan Model Data Panel

Dalam studi ini salah satu teknik yang akan dipakai adalah teknik penaksiran *fixed effect* atau *Least Square Dummy Variable ( LSDV )* yang biasa digunakan untuk menganalisis panel data *time series* dan *cross section* menggunakan asumsi slope koefisien konstan tetapi intersep antar cross section bervariasi. Dalam studi ini penaksiran tidak dilakukan dengan teknik *Pooled Least Square ( PLS )* biasa , sebab data yang digunakan adalah pooled data atau panel data , dimana ada analisis yang membedakan antar unit individu dan antar



waktu yang harus diperhitungkan. Ada beberapa alasan mengapa analisis yang dipakai adalah analisis panel data, yaitu (Gujarati, 1995 : 524)

- a. Dengan *PLS* biasa, apabila dilakukan terpisah, diasumsikan bahwa parameter regresi tidak berubah antar waktu (*temporal stability*) dan tidak berbeda antar unit – unit individunya (*cross – sectional unit*),
- b. Dengan *PLS* biasa, akan terjadi asumsi yang sangat sempit tentang asumsi klasik, *homoscedasticity* dan *autocorrelation* (pasti homoskedastis dan tidak berkorelasi pada variabel kesalahan)

Dalam melakukan teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data panel dengan metode *Least – Squares Dummy Variable (LSDV)*. Metode ini merupakan metode *fixed effect* dengan menggunakan variabel dummy, karena itu sering disebut sebagai metode *Least – Squares Dummy Variable (LSDV)*. Metode *LSDV* dipilih karena pada metode *LSDV* menambahkan *dummy variable*, sehingga menyebabkan adanya perubahan dalam intersep. Dalam penelitian ini diyakini bahwa unit *cross – section* yang dipilih dalam penelitian tidak diambil secara acak. Terlebih lagi, *fixed effect* memperhitungkan masalah *omitted variable* dimana *omitted variable* mungkin membawa perubahan dalam intersep *time – series* atau *cross – section* (Gujarati, 2003 : 642).

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa slope koefisien konstan tetapi intersep antar unit *cross section* bervariasi. Variasi intersep menunjukkan keunikan atau ciri khusus pada setiap individual yang membedakan dengan individual yang lain. Walaupun terdapat variasi intercept, tetapi intercept setiap

*cross section* tersebut tidak bervariasi sepanjang waktu atau dengan kata lain adalah time invariant ( Gujarati, 2003 : 642 ) . Selain itu , metode *fixed effect* mengasumsikan bahwa koefisien dari regresor tidak bervariasi baik antar waktu maupun antar individu.

## 5. Uji Statistik

### a. Uji t

Untuk mengetahui atau menguji bagaimanakah pengaruh dari satu variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t test . Adapun prosedurnya adalah ( Gujarati , 1999 : 74 )

1)  $H_0 : \beta = 0$  ( tidak signifikan )

$H_a : \beta > 0$  ( signifikan )

2) Nilai t tabel  $\rightarrow t = \alpha / 2 , ( N - K )$

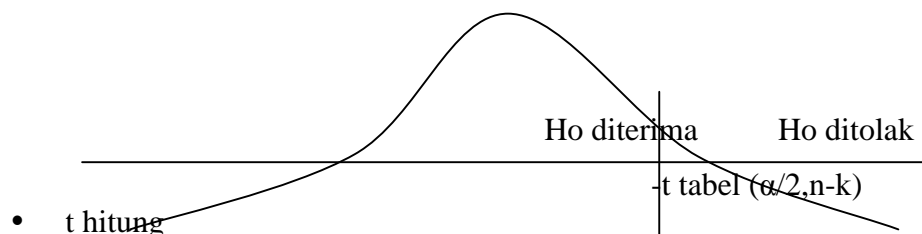
$\alpha$  = derajat signifikansi

$N$  = jumlah data yang diobservasi

$K$  = jumlah parameter dalam model termasuk intersep

3) Daerah kritis

**Gambar 3.1**  
**Daerah Krisis Uji t**



$$t \text{ hitung} = \frac{\beta_1}{se(B_1)}$$

• Kesimpulan

Ho diterima, Ha ditolak jika  $-\alpha/2:n - k < t \text{ hitung} < \alpha / 2:n-k$

Ho ditolak , Ha diterima jika  $t \text{ hitung} < \alpha/2 : n - k$  atau  $t \text{ hitung} > \alpha/2 : n - k$

## b. Uji F

Merupakan pengujian variabel-variabel independen secara keseluruhan dan serentak yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan , prosedurnya sebagai berikut (Gujarati , 2003) :

1)  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$  ( tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara bersama – sama)

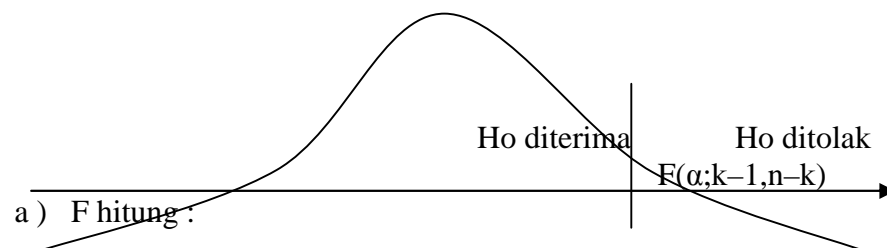
$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$  ( ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara bersama – sama )

2) Tingkat keyakinan ( *level of significance* )  $\alpha = 0,05$

F tabel :  $F(\alpha ; k - 1 , n - k )$

3) Daerah kritis

**Gambar 3.2**  
**Daerah Kritis Uji F**



$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 1(k - 1)}{(1 - R^2)(N - k)} \dots\dots\dots \text{pers. (1.13)}$$

Dimana :

$R^2$  = koefisien determinasi

$N$  = banyaknya observasi

$K$  = banyaknya variabel termasuk konstanta

b) Kesimpulan

$H_0$  diterima apabila  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_0$  ditolak apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , dapat dikatakan bahwa yang berarti variabel independen secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama – sama.

c. Uji  $R^2$

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel – variabel terikat. Koefisien Determinasi menyatakan proporsi atau prosentase total varian dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai  $R^2$  mempunyai range antara 0 dan 1. Apabila nilai  $R^2 = 1$  ini menunjukkan bahwa variasi dari variabel independen mampu menjelaskan 100 % variasi variabel dependen. Sebaliknya jika  $R^2 = 0$  maka variasi dari variabel independen tidak menjelaskan sedikitpun terhadap variasi dari variabel dependen. Ketetapan pemilihan variabel dikatakan lebih baik jika  $R^2$

semakin mendekati 1 . Sedangkan bila  $R^2$  mendekati nol maka pemilihan variabel yang ingin digunakan semakin kurang tepat.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

#### **1. Luas Wilayah**

Secara administratif Propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Luas Wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 1,00 juta hektar (30,80 persen) lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,20 persen) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas lahan sawah terbesar berpengairan teknis (38,26 persen), selainnya berpengairan setengah teknis, tadah hujan dan lain-lain. Dengan teknik irigasi yang baik, potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali sebesar 69,56 persen. Berikutnya lahan kering yang dipakai untuk tegalan/kebun/ladang/huma sebesar 34,36 persen dari total bukan lahan sawah. Persentase tersebut merupakan yang terbesar, dibandingkan presentase penggunaan bukan lahan sawah yang lain.

#### **2. Wilayah Administrasi**

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 4 kota administratif, yaitu Purwokerto, Purbalingga, Cila 57 ' n Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten.

Menyusul otonomi daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen).

Propinsi Jawa Tengah dibagi kedalam beberapa Wilayah Administrasi, meliputi :

Tabel 4.1  
Wilayah Administrasi Propinsi Jawa Tengah  
Tahun 2005-2007

Wilayah	Jumlah
Kota	6
Kabupaten	29
Kecamatan	534
Kelurahan / Desa	8540 / 31820

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah 2008

### 3. Pariwisata

Jawa Tengah banyak terdapat obyek wisata yang sangat menarik. Kota Semarang memiliki sejumlah bangunan kuno. Obyek wisata lain di kota ini termasuk Puri Maerokoco (Taman Mini Jawa Tengah) dan Museum Rekor Indonesia (MURI).

Salah satu kebanggaan provinsi ini adalah Candi Borobudur, yakni monumen Budha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-9, terdapat di

Kabupaten Magelang. Candi Mendut dan Pawon juga terletak satu kompleks dengan Borobudur. Candi Prambanan di perbatasan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Di kawasan Dieng terdapat kelompok candi-candi Hindu, yang diduga dibangun sebelum era Mataram Kuno. Kompleks candi Gedong Songo terletak di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang.

Surakarta dipandang sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa, dimana di kota ini terdapat Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran. Obyek wisata menarik di luar kota ini adalah Air Terjun Grojogan Sewu dan candi-candi peninggalan Majapahit di Kabupaten Karanganyar; serta Museum Fossil Sangiran yang terletak di jalur Solo-Purwodadi.

Bagian selatan Jawa Tengah juga menyimpan sejumlah obyek wisata alam menarik, diantaranya Goa Jatijajar dan Pantai Karangbolong di Kabupaten Kebumen, serta Baturraden di Kabupaten Banyumas. Di bagian utara terdapat Obyek Wisata Guci di lereng Gunung Slamet, Kabupaten Tegal; serta Kota Pekalongan yang dikenal dengan julukan 'kota batik'. Kawasan pantura barat banyak menyimpan wisata religius. Masjid Agung Demak yang didirikan pada abad ke-16 merupakan bangunan artistik dengan paduan arsitektur Islam dan Hindu. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kawasan pantura barat terdapat 3 makam wali sanga, yakni Sunan Kalijaga di Demak, Sunan Kudus di kota Kudus, dan Sunan Muria di Kabupaten Kudus. Kudus juga dikenal sebagai 'kota kretek', dan kota ini juga terdapat museum kretek.

#### 4. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 30.775.846 jiwa. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (1,767 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (1,644 juta jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1,603 juta jiwa).

Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi. Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,5% per tahun), sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun). Dari jumlah penduduk ini, 47% diantaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian (42,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%).

#### 5. Pertumbuhan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2007 yang di tunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), semakin membaik dari tahun sebelumnya, yaitu 3.48 persen (2006 = 3.33 persen). Hal tersebut cukup beralasan mengingat perjalanan perekonomian relatif membaik selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.



Pertumbuhan riil sektoral tahun 2005 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Listrik, Gas dan Air bersih sebesar 10.82 persen. Meskipun peranannya terhadap PDRB hanya sekitar 1.52 persen. Sektor pertanian ternyata mengalami pertumbuhan yang paling rendah selama tahun 2006, yaitu sebesar 0.80 persen.

Sedangkan PDRB menurut komponen penggunaannya terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal ekspor dan impor barang dan jasa PDRB dari sudut penggunaan yang terbesar adalah untuk pengeluaran konsumsi rumahtangga. Menurut harga berlaku tahun 2002, konsumsi rumahtangga menguasai 58,04 persen dari total PDRB Propinsi Jawa Tengah atau senilai 90,79 triliun rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya nilai tersebut naik 20,70 persen. Jika didasarkan harga konstn tahun 2006 nilainya mencapai 28,20 triliun rupiah, naik sebesar 4,41 persen dari tahun 2007.

Konsumsi pemerintah yang dipakai untuk penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah serta pertahanan dan keamanan, tahun 2007 atas dasar harga berlaku sebesar 18,39 triliun rupiah, naik menjadi 21,41 triliun rupiah pada tahun berikutnya atau meningkat 16,42 persen. Jika diukur berdasarkan harga konstan 2006, konsumsi pemerintahan tahun 2007 naik 1,83 persen dari tahun 2001.

Secara nasional, perbaikan ekonomi pasca krisis sudah nampak beberapa tahun terakhir, meskipun masih diwarnai kondisi politik yang belum kondusif. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi memberikan tanda ke arah perbaikan ekonomi yang lebih baik. Sama halnya dengan kondisi

ekonomi nasional, kinerja ekonomi Jawa Tengah tahun 2006 mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,48 persen. Sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2005 (3,33 persen). Secara keseluruhan sektor ekonomi tahun 2006 mengalami peningkatan (tumbuh positif). Namun pertumbuhannya masih dibawah pertumbuhan nasional yang sebesar 3,66 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara agregat cukup dinamis. Sejak terjadinya krisis pada pertengahan tahun 2005 dan tahun 2006, pertumbuhan ekonomi tahun tersebut menurun drastis sekitar minus 11,74 persen. Namun demikian pada periode 2006 sampai 2007, perekonomian Jawa Tengah menunjukkan adanya perbaikan yaitu rata-rata tumbuh berkisar diatas 3 persen.

Tabel 4.2  
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pertahun Jawa Tengah  
Tahun 2005 – 2007

Tahun	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi per tahun (%)
2005	3,93
2006	3,33
2007	3,48

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah 2008, diolah

## 6. Tinjauan Keuangan Daerah

### a. Pengeluaran Daerah

Tabel 4.3  
Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2007  
(Ribu Rupiah)

No	Kabupaten	2005	2006	2007
----	-----------	------	------	------

1	Kab. Cilacap	551.365.880	789.869.661	1.067.102.839
2	Kab. Banyumas	499.934.873	707.373.524	864.944.737
3	Kab. Purbalingga	314.628.794	494.161.734	556.381.842
4	Kab. Banjarnegara	379.631.264	600.590.463	610.375.533
5	Kab. Kebumen	413.260.857	586.365.907	956.431.941
6	Kab. Purworejo	315.674.237	547.856.520	583.132.018
7	Kab. Wonosobo	348.315.829	421.166.266	512.548.075
8	Kab. Magelang	437.162.963	626.380.154	734.790.190
9	Kab. Boyolali	382.077.385	531.161.932	738.497.675
10	Kab. Klaten	518.208.433	695.531.601	866.452.800
11	Kab. Sukoharjo	307.736.896	457.192.254	634.302.937
12	Kab. Wonogiri	441.082.709	550.727.784	635.205.765
13	Kab. Karanganyar	348.879.655	505.661.062	619.989.534
14	Kab. Sragen	766.104.055	532.042.245	701.934.395
15	Kab. Grobogan	451.992.263	597.848.244	787.585.439
16	Kab. Blora	370.596.273	600.370.402	568.153.122
17	Kab. Rembang	243.010.132	389.125.663	539.153.489
18	Kab. Pati	453.304.272	597.121.629	747.390.737
19	Kab. Kudus	317.650.820	424.147.768	654.272.995
20	Kab. Jepara	401.140.564	621.942.589	670.960.562
21	Kab. Demak	265.382.642	505.309.257	599.431.958
22	Kab. Semarang	271.415.555	503.284.800	503.515.233
23	Kab. Temanggung	244.119.337	474.856.187	503.515.233
24	Kab. Kendal	334.613.770	655.959.876	597.617.567
25	Kab. Batang	262.310.100	423.228.708	502.074.689
26	Kab. Pekalongan	297.233.825	474.220.306	550.622.269
27	Kab. Pemalang	388.688.853	527.438.749	651.124.069
28	Kab. Tegal	447.326.933	617.793.630	703.315.830
29	Kab. Brebes	434.585.246	897.121.973	857.239.224
30	Kota. Magelang	164.960.090	239.607.705	317.029.445
31	Kota. Surakarta	318.941.418	461.332.208	656.247.692
32	Kota. Salatiga	172.292.837	199.132.528	253.684.635
33	Kota. Semarang	647.569.061	881.316.028	1.127.846.242
34	Kota. Pekalongan	179.445.904	227.374.877	314.877.861
35	Kota. Tegal	250.636.872	295.157.487	333.581.748
	Jumlah	12.941.280.597	18.659.771.721	22.521.330.320

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah 2008, diolah

Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa Kota Semarang pada tahun 2007 mempunyai pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang paling besar diantara semua Kabupaten dan Kota Rp. 1.127.846.242.000, hal ini mungkin dapat di maklumi karena Kota

Semarang sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah yang mana segala kegiatan perekonomian Jawa Tengah berpusat di sana, selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 1.067.102.839.000, dan Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 956.431.941. Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah mengalami kenaikan dalam pengeluaran yang cukup signifikan per-tahunnya terlebih dari tahun 2005 ke tahun 2006 setelah diberlakukannya desentralisasi fiskal pada daerah.

**b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Tabel 4.4  
PAD Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2007  
(Ribu rupiah)

No	Kabupaten	2005	2006	2007
1	Kab. Cilacap	66.460.237	78.895.457	82.143.538
2	Kab. Banyumas	63.858.661	84.391.301	96.619.572
3	Kab. Purbalingga	40.755.770	47.694.606	52.744.391

4	Kab. Banjarnegara	34.084.576	43.886.242	44.873.490
5	Kab. Kebumen	31.707.305	92.533.197	58.524.924
6	Kab. Purworejo	26.836.423	32.024.961	44.187.840
7	Kab. Wonosobo	23.335.686	30.618.484	36.606.618
8	Kab. Magelang	52.503.843	62.228.388	69.962.597
9	Kab. Boyolali	31.765.650	59.307.284	67.461.523
10	Kab. Klaten	28.625.102	37.870.003	52.110.860
11	Kab. Sukoharjo	30.384.475	44.008.081	42.449.908
12	Kab. Wonogiri	36.252.036	45.321.435	50.329.495
13	Kab. Karanganyar	29.851.975	46.052.120	56.889.064
14	Kab. Sragen	43.100.003	52.019.760	65.157.983
15	Kab. Grobogan	38.336.277	41.911.235	51.564.443
16	Kab. Blora	24.835.589	36.637.785	41.620.458
17	Kab. Rembang	28.534.025	39.998.292	42.249.359
18	Kab. Pati	57.150.613	66.197.687	78.965.732
19	Kab. Kudus	39.968.702	51.247.705	55.181.545
20	Kab. Jepara	50.761.967	54.111.307	54.110.690
21	Kab. Demak	19.988.132	33.903.269	34.892.164
22	Kab. Semarang	56.511.824	66.625.756	70.860.501
23	Kab. Temanggung	24.018.628	31.187.560	34.884.602
24	Kab. Kendal	38.362.165	63.330.008	75.741.769
25	Kab. Batang	23.301.041	25.156.165	30.968.198
26	Kab. Pekalongan	29.079.225	30.803.316	42.341.232
27	Kab. Pemasang	37.335.432	59.457.262	55.835.580
28	Kab. Tegal	48.015.429	53.852.887	63.363.141
29	Kab. Brebes	36.401.586	47.995.354	65.350.835
30	Kota. Magelang	28.643.563	25.740.227	35.814.845
31	Kota. Surakarta	62.602.084	78.637.866	88.034.379
32	Kota. Salatiga	27.784.725	32.496.522	36.192.748
33	Kota. Semarang	189.772.000	224.822.680	238.237.999
34	Kota. Pekalongan	15.192.711	17.574.372	25.737.351
35	Kota. Tegal	51.067.498	63.725.637	62.259.147
	Jumlah	1.436.530.357	1 902.264.211	2.101.297.643

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah 2008, diolah dan Dinas Pendapatan Daerah

Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat Kota Semarang pada tahun 2007 masih menduduki peringkat pertama dalam pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp. 238.237.999.000,- yang diantaranya berasal dari penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain. Desentralisasi fiskal akibat diberlakukannya otonomi daerah juga membawa dampak pada nilai pendapatan daerah yang rata-rata meningkat pertahunnya, terutama pada

tahun 2005 ke 2006. Kenaikan pendapatan ini dipacu oleh penerapan otonomi daerah yang mengharuskan setiap daerah harus mampu menggali potensi daerahnya sendiri guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan daerah tersebut.

### c. Dana Perimbangan

Tabel 4.5  
Dana Perimbangan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2007  
(Ribu rupiah)

No	Kabupaten	2005	2006	2007
1	Kab. Cilacap	565.921.137	932.736.973	1.024.420.644
2	Kab. Banyumas	566.256.318	803.084.869	869.620.185
3	Kab. Purbalingga	373.971.473	514.030.873	586.644.539
4	Kab. Banjarnegara	380.294.420	552.724.134	629.936.072
5	Kab. Kebumen	479.950.708	713.786.454	732.789.193
6	Kab. Purworejo	385.327.836	542.786.848	635.796.288
7	Kab. Wonosobo	331.059.223	490.201.304	543.694.625

8	Kab. Magelang	457.573.569	663.398.074	764.307.473
9	Kab. Boyolali	398.262.209	630.290.113	707.982.739
10	Kab. Klaten	520.114.073	763.401.801	881.645.648
11	Kab. Sukoharjo	380.338.167	549.271.166	615.262.195
12	Kab. Wonogiri	452.255.414	653.850.801	726.402.345
13	Kab. Karanganyar	397.044.734	521.438.237	641.317.357
14	Kab. Sragen	412.243.716	411.992.263	740.548.294
15	Kab. Grobogan	457.888.044	594.579.462	731.481.621
16	Kab. Blora	389.932.314	539.469.611	643.901.838
17	Kab. Rembang	306.700.517	486.077.398	510.244.058
18	Kab. Pati	491.122.000	612.560.418	786.092.424
19	Kab. Kudus	365.725.307	526.871.486	667.161.251
20	Kab. Jepara	411.000.176	562.503.065	689.656.991
21	Kab. Demak	330.881.579	468.630.436	613.252.153
22	Kab. Semarang	410.313.702	571.988.038	656.531.045
23	Kab. Temanggung	312.492.752	455.673.346	522.942.016
24	Kab. Kendal	408.871.124	576.116.856	649.377.097
25	Kab. Batang	306.379.929	421.830.993	503.000.814
26	Kab. Pekalongan	312.317.204	475.316.079	556.884.427
27	Kab. Pemasang	427.237.188	638.059.214	686.308.758
28	Kab. Tegal	467.972.600	641.951.148	710.722.353
29	Kab. Brebes	512.166.080	763.221.215	836.639.932
30	Kota. Magelang	192.088.702	290.381.025	325.829.691
31	Kota. Surakarta	366.098.564	510.767.193	601.429.871
32	Kota. Salatiga	191.383.605	272.730.533	302.688.639
33	Kota. Semarang	790.214.166	940.963.475	1.082.784.142
34	Kota. Pekalongan	192.501.499	274.809.552	331.051.726
35	Kota. Tegal	262.294.266	289.459.851	342.986.695
	Jumlah	14.006.194.314	19.656.954.304	22.851.335.139

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah 2008, diolah

Tabel 4.5 menunjukkan total dana perimbangan di Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2007 yang mana Kota Semarang sebagai Ibu Kota Propinsi tetap menduduki peringkat pertama dalam perolehan penerimaan dana perimbangan dengan nilai sebesar Rp. 1.082.784.142.000, diikuti dengan Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 1.024.420.644.000 dan Kabupaten Klaten Rp. 881.645.648.000. Dana perimbangan terdiri dari dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus yang merupakan cerminan potensi dari daerah tersebut, dimana

makin berpotensi suatu daerah yang misalnya memiliki sumber daya alam yang melimpah dalam hal ini Kabupaten Cilacap dapat dijadikan contoh, akan mendapatkan dana perimbangan yang berbeda dengan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam.

## B. Hasil Analisis dan Pembahasan

Data diolah menggunakan Eviews 3 secara panel dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu: Pendekatan PLS, Fixed Effect dan Random Effect. Hasil perolehan data merupakan angka riil dari PAD, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk, dan pengeluaran pemerintah daerah tahun 2005 – 2007.

### 1. Pendekatan PLS

Hasil estimasi data panel dengan menggunakan pendekatan PLS. Dari hasil estimasi data panel, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,5513. Hal ini berarti model mampu menjelaskan variasi investasi sebesar 55,13 %.

Tabel 4.6  
Hasil Estimasi Data Panel Periode 2005-2007  
dengan Pendekatan PLS (Common)

Variabel	Koefisien
Konstanta	9978182 (4.16550)
PAD	1.29914 (4.90189)
DP	1.12232 (3.19658)
JP	7.67108 (3.38876)
F-statistic	16.848733 (0.00012)
R <sup>2</sup>	0.551305

Sumber : Data hasil pengolahan Eviews 3.0

Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan t-statistic masing-masing variabel



Dari hasil estimasi dapat diketahui bahwa variabel PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pengeluaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dalam menentukan besaran pengeluaran pemerintah 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Dana perimbangan (DP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pengeluaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dalam menentukan besaran pengeluaran pemerintah 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Jumlah penduduk (JP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pengeluaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dalam menentukan besaran pengeluaran pemerintah 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Adapun pengaruh PAD, dana perimbangan, dan jumlah penduduk secara simultan terhadap pengeluaran pemerintah daerah, dengan uji F sebesar 16.848733. Selanjutnya, analisis akan dilakukan dengan pendekatan fixed effect dan random effect. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui perbedaan hasil yang diperoleh dari tiga pendekatan yang digunakan.

## **2. Pendekatan Fixed Effect**

Hasil Estimasi Data Panel Periode 2005-2007 dengan pendekatan fixed effect pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7  
Hasil Estimasi Data Panel Periode 2005-2007  
Pendekatan Fixed Effect

Variable	Koefisien
Konstanta	4.77196 (2.57182)
PAD	0.55047 (5.02690)
DP	0.35733 (4.28797)
JP	1.76752 (3.46925)
F-statistic	12.25116 (0.00018)
R <sup>2</sup>	0.809165

Sumber : Data hasil pengolahan Eviews 3.0

Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan t-statistic masing-masing variabel

Hasil estimasi dengan pendekatan *fixed effect* pada tabel 4.7 menunjukkan hasil bahwa PAD secara statistik yang dengan koefisien signifikan pada  $\alpha = 1\%$  dengan koefisien sebesar 0.55047. Hal ini berarti variabel PAD berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Demikian juga untuk variabel dana perimbangan dan Jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan. Hasil estimasi dengan pendekatan *fixed effect* ini memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0.809165 atau 80,92%. Jadi, koefisien determinasi yang diperoleh dengan pendekatan *fixed effect* cenderung lebih besar daripada pendekatan PLS.

### 3. Pendekatan Random Effect

Hasil estimasi dengan pendekatan random effect pada tabel 4.8 menunjukkan hasil bahwa variabel PAD secara statistik signifikan dengan koefisien  $\alpha = 5\%$ . Hal ini berarti variabel PAD berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Hal tersebut sama dengan variabel Dana Perimbangan secara statistik signifikan dengan koefisien  $\alpha = 1\%$ , dan

Jumlah Penduduk secara statistik signifikan dengan koefisien  $\alpha = 5\%$  sehingga Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara signifikan.

Tabel 4.8  
Hasil Estimasi Data Panel Periode 2005-2007  
Pendekatan Random Effect

Variabel	Koefisien
Konstanta	10.0212 (1.25019)
PAD	1.15597 (4.344242)
DP	0.75039 (1.69167)
JP	3.71178 (2.35014)
F-statistic	9.089217 (0.000461)
R <sup>2</sup>	0.651305

Sumber : Data hasil pengolahan Eviews 3.0

Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan t-statistic masing-masing variable

Nilai intersep (C) 10.0212 merupakan nilai rata-rata dari *random error component*. Sedangkan nilai random effect menunjukkan seberapa besar perbedaan *random error component* sebuah propinsi terhadap nilai intercept (C) Jika semua nilai random effect dijumlahkan, maka akan menghasilkan angka nol. Masing-masing kabupaten atau kotamadya ada perbedaan, perbedaan nilai intersep ini mencerminkan heterogenitas, artinya terdapat faktor yang berbeda-beda dalam mempengaruhi investasi pada tiap kabupaten atau kotamadya se-Jawa Tengah.

## C. Hasil Pemilihan Model

### 1. Uji Restricted-F

Untuk mengetahui metode mana yang tepat digunakan antara *fixed effect* atau *Pooled Least Square*, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji Restricted-F.

Di mana hipotesisnya:

$H_0$  = Pendekatan *PLS (Restricted)*

$H_a$  = Pendekatan *fixed effect (Unrestricted)*

Restricted-F dirumuskan sebagai berikut:

$$F(m, n - k) = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2) / m}{(1 - R_{UR}^2) / (n - k)}$$

Di mana:

$R_{UR}^2$  = koefisien determinasi unrestricted

$R_R^2$  = koefisien determinasi restricted

m = jumlah “restricted”

k = total koefisien regresi (termasuk konstanta)

n = jumlah sampel operasi

dengan asumsi  $F_{\text{kritis}} \leq F[(n-1), (nT-n-k)]$  tolak  $H_0$ , maka hasilnya adalah:

$$F(102) = \frac{(0,809165 - 0,551305) / 4}{(1 - 0,809165) / 101} = 34,1183$$

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa nilai dari  $F_{\text{hitung}}$  adalah sebesar

34,1183 sedangkan nilai  $F_{\text{kritis}}$  dengan numerator 4 dan denumatorator 31

pada  $\alpha=5\%$  dan  $\alpha=1\%$  masing-masing adalah 1,82 dan 2,34 yang berarti

$F_{\text{kritis}} \leq F_{\text{hitung}}$  maka dengan demikian kita menolak hipotesis nul. Model

panel data yang tepat untuk menganalisis perilaku ke-tigapuluhlima Kota

dan Kabupaten se Jawa Tengah adalah metode *Fixed Effect* dengan teknik LSDV daripada model PLS.

## 2. Uji *Langrange Multiplier* (LM)

Dari hasil uji antara metode PLS dengan model *Fixed Effect* diatas menghasilkan bahwa metode *Fixed Effect* yang paling tepat untuk menganalisis data panel ini, namun ada satu uji lagi yang harus dilakukan untuk mendapatkan model yang paling tepat dalam menganalisis data panel pada penelitian ini yaitu membandingkan PLS dengan model *Random Effect*. Uji ini dilakukan berdasarkan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji signifikansi model *Random Effect* dikembangkan oleh Bruesch-Pagan. Metode Bruesch-Pagan untuk uji signifikansi model *Random Effect* didasarkan pada nilai residual dari metode PLS. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula yang terdapat pada buku Gujarati adalah:

Untuk mengetahui metode mana yang tepat digunakan antara *random effect* atau *Pooled Least Square*, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji LM

Dimana Hipotesisnya :

$H_0$  = Pendekatan *PLS*

$H_a$  = Pendekatan *Random Effect*

Nilai LM dirumuskan sebagai berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[ \frac{\sum_{i=1}^n \left[ \sum_{t=1}^T e_{it} \right]}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

Dimana  $n$  = jumlah cross-section,  $T$  – jumlah time-series, dan  $e$  = residual pendekatan PLS.

$$LM = \frac{105}{2(3-1)} = \left[ \frac{2,122718}{4,5059317} - 1 \right]^2$$

$$LM = 7,343212$$

Berdasarkan hasil tersebut diketahui nilai kritis tabel distribusi chi squares dengan df sebesar 3 pada  $\alpha=1\%$  dan  $\alpha=5\%$  masing-masing sebesar 11.345 dan 7.81473. karena  $LM \leq$  nilai chi squares, maka dengan demikian secara statistik tidak signifikan sehingga menerima hipotesis nul. Model PLS lebih tepat dibandingkan dengan metode *Random Effect*.

#### D. Pengujian Hipotesa

##### 1. Uji T-Statistik

Yaitu pengujian statistik terhadap koefisien parameter regresi secara individual.

Tabel 4.9  
Hasil Uji Signifikansi

Variabel	Koefisien	t-tabel	Keterangan
PAD	0.55047 (5.02690)	1.6955	Signifikan
DP	0.35733 (4.28797)	1.6955	Signifikan
JP	1.76752 (3.46925)	1.6955	Signifikan
Dengan $\alpha= 1\%$ $n = 35$ t-tabel = $(\alpha, n-k)$ $k = 4$			

Dari tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran pemerintah masing-masing daerah Kota dan Kabupaten tersebut, hal ini

ditunjukkan dengan nilai t-hitung (5.02690) yang lebih besar dari nilai t-tabelnya (1,6955),  $H_0$  ditolak karena  $H_1$  diterima sehingga PAD berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Pemerintah.

- b. Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada masing-masing daerah Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran pemerintah masing-masing daerah Kota dan Kabupaten tersebut, hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung (4.28797) yang lebih besar daripada t-tabelnya (1,6955),  $H_0$  ditolak karena  $H_1$  diterima sehingga Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Pemerintah.
- c. Jumlah Penduduk di masing-masing daerah Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai besaran pengeluaran pemerintah masing-masing daerah tersebut, hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung (3.46925) yang lebih besar daripada t-tabelnya (1,6955),  $H_0$  ditolak karena  $H_1$  diterima sehingga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Pemerintah.

## 2. Uji F-Statistik

Yaitu pengujian secara serempak hubungan variabel-variabel independen secara keseluruhan dengan variabel dependen, dengan membandingkan antara F-hitung dengan F-tabelnya. F-hitung yang dihasilkan adalah 12.25116 dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ , ( $\alpha$ , (k-1) (n-k)) adalah (5%, (3) (31)) = 2,69. Dengan F-hitung lebih besar daripada F-tabelnya maka  $H_0$  ditolak, ini berarti variabel-

variabel independen secara serempak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

### 3. Uji Koefisien $R^2$

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependennya. Dari perhitungan diperoleh hasil bahwa  $R^2$  sebesar 0,8092 atau sekitar 80,92% dari variasi pengeluaran pemerintah masing-masing Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah, Dana Perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masing-masing, dan jumlah penduduk pada daerah masing-masing.

### 4. Interpretasi

Dari hasil estimasi yang didapat, maka hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen dapat ditunjukkan sebagai berikut :

- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempunyai koefisien positif sebesar 0,55 yang berarti setiap ada kenaikan jumlah PAD pada masing-masing daerah di Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan tingkat pengeluaran pemerintah pada masing-masing daerah sebesar 0,55%, dengan asumsi variabel yang lain tetap (*Ceteris Paribus*).
- b. Variabel Dana Perimbangan (DP), mempunyai koefisien positif sebesar 0,36 yang berarti setiap ada kenaikan jumlah Dana Perimbangan pada masing-masing daerah di Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 1% akan



menyebabkan kenaikan tingkat pengeluaran pemerintah pada masing-masing daerah sebesar 0,36 %, dengan asumsi variabel yang lain tetap (*Ceteris Paribus*).

- c. Variabel Jumlah Penduduk (JP), mempunyai koefisien positif sebesar 1,77 yang berarti setiap ada kenaikan jumlah penduduk pada masing-masing daerah di Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan tingkat pengeluaran pemerintah pada masing-masing daerah sebesar 1,77%, dengan asumsi variabel yang lain tetap (*Ceteris Paribus*).

## **5. Pembahasan**

PAD mempunyai pengaruh yang signifikan pada masing-masing daerah di Jawa Tengah dengan pengeluaran pemerintah daerah. PAD mempunyai peranan yang strategis di dalam keuangan daerah karena bagi suatu daerah sumber pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga kehidupan daerah. Oleh karena itu para ahli sering memakai PAD sebagai alat analisis dalam menilai tingkat otonomi suatu daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan keuangan dengan otonomi untuk mengatur keperluan rumah tangganya tentu membutuhkan dana. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya faktor keuangan untuk melaksanakan otonomi daerah, karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, sehingga membutuhkan sumber keuangan yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggali sumber PAD. Jika penerimaan PAD telah mencapai 20% dari pengeluaran daerah, maka sumber keuangan daerah sudah

dapat dikatakan cukup, sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat kecil (Kaloh, 1992, Hal. 32).

Dana perimbangan mempunyai pengaruh yang signifikan pada masing-masing daerah di Jawa Tengah dengan pengeluaran pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DHB), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), selain ditujukan untuk konsolidasi desentralisasi fiskal dan memperkecil ketimpangan keuangan antara pusat dan daerah serta antar daerah dengan tetap menjaga netralitas fiskal, juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan daerah. daerah yang potensi penerimaannya tinggi, baik itu berupa pajak maupun sumber daya alam, akan dapat menikmati pendapatan yang lebih baik. Besarnya bagian daerah tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri bersih, yaitu penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dan DAK yang bersumber dari dana reboisasi. DAU diberikan kepada daerah-daerah dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan antar daerah berdasarkan pertimbangan bahwa potensi fiskal dan kebutuhan dari masing-masing daerah berbeda.

Jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan pada masing-masing daerah di Jawa Tengah dengan pengeluaran pemerintah daerah. Dalam *Solow Growth Model* (model pertumbuhan Solow), suatu negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi akan mempunyai persediaan modal per pekerja pada kondisi mapan yang rendah dan juga tingkat pendapatan per pekerja yang rendah. Dengan kata lain, pertumbuhan populasi yang tinggi

cenderung menyulitkan suatu negara karena sulit mempertahankan tingkat modal per pekerja yang tinggi apabila jumlah pekerja tumbuh dengan cepat. Dalam model Solow tersebut tidak hanya berlaku untuk suatu negara saja, tetapi juga berlaku terhadap suatu provinsi atau daerah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan pertumbuhan populasi yang tinggi cenderung mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang rendah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa data yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah pada daerah Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian secara keseluruhan (uji F) didapat nilai F hitung lebih tinggi dari F tabel. Berarti secara bersama-sama variabel penjelas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta Jumlah Penduduk mempengaruhi nilai pengeluaran pemerintah pada masing-masing daerah se Jawa Tengah.
2. Dari hasil pengujian koefisien regresi secara individu (uji t) dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah. Variabel penjelas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah di masing-masing daerah Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah. Peranan PAD dalam membiayai pengeluaran pemerintah pada masing-masing daerah yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Setiap kenaikan 1% PAD hanya akan menyebabkan pengeluaran pemerintah pada masing-masing daerah bertambah sebesar 0,55%.
3. Variabel Dana Perimbangan mempunyai tanda parameter positif yang berarti sesuai dengan hipotesa awal.  $t = 1,81 > t_{table} = 1,64$  1% Dana Perimbangan yang diberikan

pemerintah pusat pada pemerintah daerah Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah akan menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah di masing-masing daerah sebesar 0,36 %. Pengujian t membuktikan bahwa nilai t-statistik berada pada daerah penolakan  $H_0$ , artinya variabel independen Dana Perimbangan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel pengeluaran pemerintah di Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah. Dengan kata lain Dana Perimbangan mampu mempengaruhi pengeluaran pemerintah masing-masing daerah secara positif.

4. Variabel Jumlah Penduduk mempunyai tanda parameter positif yang berarti sesuai dengan hipotesa. Kenaikan 1% Jumlah Penduduk pada setiap pemerintah daerah Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah akan menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah di masing-masing daerah sebesar 1,77 %. Pengujian t membuktikan bahwa nilai t-statistik berada pada daerah penolakan  $H_0$ , artinya variabel independen Jumlah Penduduk secara signifikan berpengaruh terhadap variabel pengeluaran pemerintah di Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah. Dengan kata lain Jumlah Penduduk mampu mempengaruhi pengeluaran pemerintah masing-masing daerah secara positif.
5. Faktor yang paling dominan adalah tingkat Dana Perimbangan lebih besar daripada PAD dan Jumlah Penduduk dalam menentukan nilai pengeluaran pemerintah di Propinsi Jawa Tengah.
6. Penafsiran koefisien determinan ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa besarnya persentase variabel bebas PAD, Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk dengan variasi Variabel dependen yaitu Pengeluaran Pemerintah sebesar 80,9%, sedangkan sisanya sebesar 19,1% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang dapat dari peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian, saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Pemda perlu meningkatkan PAD dengan memaksimalkan kekayaan sumber daya alam seperti tempat-tempat wisata, daerah tambang minyak dan memberikan modal kepada masyarakat yang memiliki kekayaan alam untuk diolah dan dijadikan pemasukan daerah sehingga dapat meningkatkan PAD. Untuk Dana Perimbangan, pengelola perlu mengetahui sumber-sumber pendapatan masing-masing daerah sehingga dapat menyeimbangkan antara pendapatan dengan pengeluaran dengan lebih seksama. Untuk Jumlah Penduduk, Pemerintah daerah perlu menata kembali kebijakan kependudukan di wilayah masing-masing. Selain itu pemerintah perlu mensosialisasikan pentingnya pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peranan masyarakat dalam keikutsertaannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian serta kesejahteraan masyarakatnya meningkat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dari keterbatasan penelitian ini disarankan untuk menambah data dalam variabel, baik PAD, dana perimbangan, dan jumlah penduduk. Semakin banyak perolehan data dapat lebih meningkatkan kualitas hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Sanusi. 2001. Efisiensi Alokasi Sumber Daya, Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah, dan Meningkatkan Penerimaan Melalui Pajak Daerah dan Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 12 No.5. Hal. 87-99.
- Bailey, White. 1995. "Decentralization, Governance and Public Services The Impact Of Institutional Arrangements." *IRIS Center, University of Maryland, College Park*.
- Damayanti, Ayu. 2008. Implikasi Variabel Pengeluaran Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Bali. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Denpasar.

- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariata dengan Program SPSS*, Edisi II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometri CS*. Edisi 8. Erlangga.
- Halim, A., Achmad Tjahjono, M.F. Husein. 2001. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Halim, K. 2001. *Kebijakan dan Implementasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imansyah, Muhammad Handry. 2005. Ekonomi Indonesia 2004 dan Prospek 2005 Ditengah Ketidakpastian Ekonomi Dunia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 22 No.4. Hal. 132-146.
- Indrawati, Yulia. 2006. Otonomi Daerah Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah*. Volume 24 No. 4 Tahun 2001.
- Kaloh, J. 2004. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan
- Mangkoesoebroto, M. 1993. *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbitan STIE – YKPN, Yogyakarta.
- Machfud Sidik dan Soewondo. 1992. *Perekonomian Makro dan Mikro*. <http://google.go.id.jurnalekonomi/> Diakses 2 Nopember 1992. Pukul 11.20.
- Nugroho, M. 2005. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap pertumbuhan Ekonomi Di DIY. *Skripsi Ekonomi* (tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Universitas Islam Yogyakarta.
- PP Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dan 85 *ngan*, Jakarta: Citra Umbara.
- Saragih, P. 2003. *Perekonomian Indonesia* : Ghalia Indonesia.
- Sitompul, Novita Linda. Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 8 No.7, Maret 2006
- Soenarto, 2001. Otonomi Daerah Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah*. Volume 24 No. 4 Tahun 2001.
- Sudjana. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharno. 1992. Dampak Perubahan Harga Input dan Out Terhadap Peningkatan Produksi Padi di Jawa dan Bali. *Tesis* (Tidak Diterbitkan). Yogyakarta: UGM.



- Suwandi. 2000. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- UU RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah*, Citra Umbara, Bandung, 2001
- Udjianto. 2003. Pengaruh Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan Pengeluaran Pemerintah Daerah. *Skripsi Ekonomi*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Yudoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Yulistio, 2004. Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. *Makalah*.
- Wirawan, Dony Dahana. 2006. Panel Data: Riset Perilaku Konsumen dan Pemasaran. Artikel Iptek - Bidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Pemasaran. <http://beritaiptek.com/> Diakses 19 Desember. 2008. Pukul 22.45.
- Novita Linda Sitompul, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 8 No.7, Maret 2006. "Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara".
- Muhammad Handry Imansyah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 22 No.4, Oktober 2005. "Ekonomi Indonesia 2004 dan Prospek 2005 Ditengah Ketidakpastian Ekonomi Dunia".
- Sanusi Azwar, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 12 No.5, Juni 2000. "Efisiensi Alokasi Sumber Daya, Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah, dan Meningkatkan Penerimaan Melalui Pajak Daerah dan Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat"



## Data Penelitian

No	Kabupaten	Tahun	PAD	DP	JP	PPD
1	Kab. Cilacap	2005	66460237	565921137	1369529	551365880
2	Kab. Banyumas	2005	63858661	566256318	1170340	499934873
3	Kab. Purbalingga	2005	40755770	373971473	643231	314628794
4	Kab. Banjarnegara	2005	34084576	380294420	806224	379631264
5	Kab. Kebumen	2005	31707305	479950708	1017496	413260857
6	Kab. Purworejo	2005	26836423	385327836	816895	315674237
7	Kab. Wonosobo	2005	23335686	331059223	734951	348315829
8	Kab. Magelang	2005	52503843	457573569	970056	437162963
9	Kab. Boyolali	2005	31765650	398262209	844316	382077385
10	Kab. Klaten	2005	28625102	520114073	1102642	518208433
11	Kab. Sukoharjo	2005	30384475	380338167	806317	307736896
12	Kab. Wonogiri	2005	36252036	452255414	958781	441082709
13	Kab. Karanganyar	2005	29851975	397044734	643212	348879655
14	Kab. Sragen	2005	43100003	412243716	585386	766104055
15	Kab. Grobogan	2005	38336277	457888044	741779	451992263
16	Kab. Blora	2005	24835589	389932314	670684	370596273
17	Kab. Rembang	2005	28534025	306700517	650205	243010132
18	Kab. Pati	2005	57150613	491122000	795618	453304272
19	Kab. Kudus	2005	39968702	365725307	775338	317650820
20	Kab. Jepara	2005	50761967	411000176	665820	401140564
21	Kab. Demak	2005	19988132	330881579	701469	265382642
22	Kab. Semarang	2005	56511824	410313702	705740	271415555
23	Kab. Temanggung	2005	24018628	312492752	662485	244119337
24	Kab. Kendal	2005	38362165	408871124	866807	334613770
25	Kab. Batang	2005	23301041	306379929	526973	262310100
26	Kab. Pekalongan	2005	29079225	312317204	662112	297233825
27	Kab. Pemalang	2005	37335432	427237188	905743	388688853
28	Kab. Tegal	2005	48015429	467972600	758116	447326933
29	Kab. Brebes	2005	36401586	512166080	1085792	434585246
30	Kota. Magelang	2005	28643563	192088702	407228	164960090
31	Kota. Surakarta	2005	62602084	366098564	629690	318941418
32	Kota. Salatiga	2005	27784725	191383605	405733	172292837
33	Kota. Semarang	2005	189772000	790214166	1122104	647569061
34	Kota. Pekalongan	2005	15192711	192501499	408103	179445904
35	Kota. Tegal	2005	51067498	262294266	424917	250636872
36	Kab. Cilacap	2006	78895457	932736973	1417760	789869661
37	Kab. Banyumas	2006	84391301	803084869	1220689	707373524
38	Kab. Purbalingga	2006	47694606	514030873	781327	494161734
39	Kab. Banjarnegara	2006	43886242	552724134	840141	600590463
40	Kab. Kebumen	2006	92533197	713786454	1084955	586365907
41	Kab. Purworejo	2006	32024961	542786848	825036	547856520
42	Kab. Wonosobo	2006	30618484	490201304	745106	421166266
43	Kab. Magelang	2006	62228388	663398074	1008365	626380154
44	Kab. Boyolali	2006	59307284	630290113	918041	531161932
45	Kab. Klaten	2006	37870003	763401801	1160371	695531601
46	Kab. Sukoharjo	2006	44008081	549271166	834892	457192254
47	Kab. Wonogiri	2006	45321435	653850801	993853	550727784
48	Kab. Karanganyar	2006	46052120	521438237	692586	505661062
49	Kab. Sragen	2006	52019760	411992263	626228	532042245
50	Kab. Grobogan	2006	41911235	594579462	803761	597848244
51	Kab. Blora	2006	36637785	539469611	719994	600370402
52	Kab. Rembang	2006	39998292	486077398	708838	389125663

53	Kab. Pati	2006	66197687	612560418	819836	597121629
54	Kab. Kudus	2006	51247705	526871486	800845	424147768
55	Kab. Jepara	2006	54111307	562503065	698754	621942589
56	Kab. Demak	2006	33903269	468630436	712318	505309257
57	Kab. Semarang	2006	66625756	571988038	769422	503284800
58	Kab. Temanggung	2006	31187560	455673346	692623	474856187
59	Kab. Kendal	2006	63330008	576116856	875698	655959876
60	Kab. Batang	2006	25156165	421830993	541183	423228708
61	Kab. Pekalongan	2006	30803316	475316079	722480	474220306
62	Kab. Pemalang	2006	59457262	638059214	969850	527438749
63	Kab. Tegal	2006	53852887	641951148	811571	617793630
64	Kab. Brebes	2006	47995354	763221215	1160096	897121973
65	Kota. Magelang	2006	25740227	290381025	441379	239607705
66	Kota. Surakarta	2006	78637866	510767193	676366	461332208
67	Kota. Salatiga	2006	32496522	272730533	414550	199132528
68	Kota. Semarang	2006	224822680	940963475	1172072	881316028
69	Kota. Pekalongan	2006	17574372	274809552	417711	227374877
70	Kota. Tegal	2006	63725637	289459851	439979	295157487
71	Kab. Cilacap	2007	82143538	1024420644	1459561	1067102839
72	Kab. Banyumas	2007	96619572	869620185	1278785	864944737
73	Kab. Purbalingga	2007	52744391	586644539	850364	556381842
74	Kab. Banjarnegara	2007	44873490	629936072	920496	610375533
75	Kab. Kebumen	2007	58524924	732789193	1127118	956431941
76	Kab. Purworejo	2007	44187840	635796288	929990	583132018
77	Kab. Wonosobo	2007	36606618	543694625	810785	512548075
78	Kab. Magelang	2007	69962597	764307473	1138178	734790190
79	Kab. Boyolali	2007	67461523	707982739	1046932	738497675
80	Kab. Klaten	2007	52110860	881645648	1228266	866452800
81	Kab. Sukoharjo	2007	42449908	615262195	896725	634302937
82	Kab. Wonogiri	2007	50329495	726402345	1016772	635205765
83	Kab. Karanganyar	2007	56889064	641317357	738934	619989534
84	Kab. Sragen	2007	65157983	740548294	719688	701934395
85	Kab. Grobogan	2007	51564443	731481621	915022	787585439
86	Kab. Bora	2007	41620458	643901838	743121	568153122
87	Kab. Rembang	2007	42249359	510244058	746595	539153489
88	Kab. Pati	2007	78965732	786092424	856251	747390737
89	Kab. Kudus	2007	55181545	667161251	918801	654272995
90	Kab. Jepara	2007	54110690	689656991	719313	670960562
91	Kab. Demak	2007	34892164	613252153	770818	599431958
92	Kab. Semarang	2007	70860501	656531045	832274	503515233
93	Kab. Temanggung	2007	34884602	522942016	747166	503515233
94	Kab. Kendal	2007	75741769	649377097	951991	597617567
95	Kab. Batang	2007	30968198	503000814	614861	502074689
96	Kab. Pekalongan	2007	42341232	556884427	792153	550622269
97	Kab. Pemalang	2007	55835580	686308758	1111820	651124069
98	Kab. Tegal	2007	63363141	710722353	909226	703315830
99	Kab. Brebes	2007	65350835	836639932	1255357	857239224
100	Kota. Magelang	2007	35814845	325829691	472844	317029445
101	Kota. Surakarta	2007	88034379	601429871	714316	656247692
102	Kota. Salatiga	2007	36192748	302688639	490356	253684635
103	Kota. Semarang	2007	238237999	1082784142	1229275	1127846242
104	Kota. Pekalongan	2007	25737351	331051726	436304	314877861
105	Kota. Tegal	2007	62259147	342986695	455638	333581748

## Hasil Estimasi Regresi dengan Pendekatan Common Effect / *Pooled Least Square*

Dependet Variable: PPD  
 Method: Pooled Least Square  
 Date: 05/04/2010 Time: 20:42  
 Sample: 2005 2006 2007  
 Included observations: 3  
 Total Panel observations: 105  
 Cross sections without valid observations dropped

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	9978182	2395432	4.16550	0.00028
PAD	1.29914	0.26512	4.90189	0.00011
DP	1.12232	0.35134	3.19658	0.00211
JP	7.67108	2.25709	3.38876	0.00187
R-squared	0.551305	Mean dependent var		51545126
Adjusted R-Square	0.443122	S.D. dependent var		19723979
S.E of regression	4071815	Akaike info criterion		38.105422
Sum squared resid	2.122718	Schwarz criterion		38.294244
Log likelihood	-281.791	F-statistic		16.848733
Durbin-Watson stat	0.761851	Prob(F-statistic)		0.0001209

## Hasil Estimasi Regresi dengan Pendekatan Fixed Effect

Dependet Variable: PPD  
 Method: Fixed Effect  
 Date: 05/04/2010 Time: 20:51  
 Sample: 2005 2006 2007  
 Included observations: 3  
 Total Panel observations: 105

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	4.77196	1.85548	2.57182	0.03121
PAD	0.55047	0.19050	5.02690	0.00009
DP	0.35733	0.08333	4.28797	0.00004
JP	1.76752	0.50948	3.46925	0.00064
R-squared	0.809165	Mean dependent var		1.22E+15
Adjusted R-Square	0.691038	S.D. dependent var		1.31E+15
S.E of regression	9.35E+14	Akaike info criterion		72.08630
Sum squared resid	7.00E+30	Schwarz criterion		72.41672
Log likelihood	-533.6411	F-statistic		12.25116
Durbin-Watson stat	2.456321	Prob(F-statistic)		0.000181

## Hasil Estimasi Regresi dengan Pendekatan Random Effect

Dependet Variable: PPD  
 Method: Random Effect  
 Date: 05/04/2010 Time: 20:51  
 Sample: 2005 2007  
 Included observations: 105

Variabel	Coeficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	10.0212	8.01569	1.25019	0.23455
PAD	1.15597	0.26609	4.34424	0.00011
DP	0.75039	0.44358	1.69167	0.14205
JP	3.71178	1.57939	2.35014	0.03784
R-squared	0.651305	Mean dependent var		1.19E+11
Adjusted R-Square	0.556206	S.D. dependent var		1.22E+11
S.E of regression	4.32E+12	Akaike info criterion		61.18292
Sum squared resid	3.51E+24	Schwarz criterion		61.31618
Log likelihood	-276.8161	F-statistic		9.089217
Durbin-Watson stat	1.562722	Prob(F-statistic)		0.000461

intercept

1	Kab. Cilacap	-1,36373
2	Kab. Banyumas	-1,44712
3	Kab. Purbalingga	-0,72998
4	Kab. Banjarnegara	0,32073
5	Kab. Kebumen	0,73511
6	Kab. Purworejo	-0,74537
7	Kab. Wonosobo	0,73896
8	Kab. Magelang	1,02889
9	Kab. Boyolali	-1,29317
10	Kab. Klaten	0,00513
11	Kab. Sukoharjo	-1,25340
12	Kab. Wonogiri	-1,49459
13	Kab. Karanganyar	1,95198
14	Kab. Sragen	1,88203
15	Kab. Grobogan	-1,03018
16	Kab. Blora	1,35604
17	Kab. Rembang	1,62930
18	Kab. Pati	1,12255
19	Kab. Kudus	0,60553
20	Kab. Jepara	-0,61195
21	Kab. Demak	0,20783
22	Kab. Semarang	1,95515
23	Kab. Temanggung	-0,62991
24	Kab. Kendal	-0,55935
25	Kab. Batang	0,87879
26	Kab. Pekalongan	-0,18859
27	Kab. Pemasang	-1,30729
28	Kab. Tegal	-0,33741
29	Kab. Brebes	-1,45225
30	Kota. Magelang	-1,42788
31	Kota. Surakarta	-1,68446
32	Kota. Salatiga	-1,32396
33	Kota. Semarang	1,87048
34	Kota. Pekalongan	0,01539
35	Kota. Tegal	-0,58886



Tabel Nilai t

d.f.	t <sub>0.10</sub>	t <sub>0.05</sub>	t <sub>0.025</sub>	t <sub>0.01</sub>	t <sub>0.005</sub>	d.f.
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	1
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	2
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	3
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	4
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	6
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	7
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	8
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	9
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	10
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	11
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	12
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	13
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	14
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	15
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	16
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	17
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	18
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	19
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	20
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	21
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	22
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	23
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	24
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	25
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	26
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	27
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	28
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	29
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	30
31	1.309	1.696	2.040	2.453	2.744	31
32	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738	32
33	1.308	1.692	2.035	2.445	2.733	33
34	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728	34
35	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724	35
36	1.306	1.688	2.028	2.434	2.719	36
37	1.305	1.687	2.026	2.431	2.715	37
38	1.304	1.686	2.024	2.429	2.712	38
39	1.304	1.685	2.023	2.426	2.708	39
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	40

Sumber: Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Dr. Imam Ghozali)

Tabel Nilai t

d.f.	t <sub>0.10</sub>	t <sub>0.05</sub>	t <sub>0.025</sub>	t <sub>0.01</sub>	t <sub>0.005</sub>	d.f.
41	1.303	1.683	2.020	2.421	2.701	41
42	1.302	1.682	2.018	2.418	2.698	42
43	1.302	1.681	2.017	2.416	2.695	43
44	1.301	1.680	2.015	2.414	2.692	44
45	1.301	1.679	2.014	2.412	2.690	45
46	1.300	1.679	2.013	2.410	2.687	46
47	1.300	1.678	2.012	2.408	2.685	47
48	1.299	1.677	2.011	2.407	2.682	48
49	1.299	1.677	2.010	2.405	2.680	49
50	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	50
51	1.298	1.675	2.008	2.402	2.676	51
52	1.298	1.675	2.007	2.400	2.674	52
53	1.298	1.674	2.006	2.399	2.672	53
54	1.297	1.674	2.005	2.397	2.670	54
55	1.297	1.673	2.004	2.396	2.668	55
56	1.297	1.673	2.003	2.395	2.667	56
57	1.297	1.672	2.002	2.394	2.665	57
58	1.296	1.672	2.002	2.392	2.663	58
59	1.296	1.671	2.001	2.391	2.662	59
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	60
61	1.296	1.670	2.000	2.389	2.659	61
62	1.295	1.670	1.999	2.388	2.657	62
63	1.295	1.669	1.998	2.387	2.656	63
64	1.295	1.669	1.998	2.386	2.655	64
65	1.295	1.669	1.997	2.385	2.654	65
66	1.295	1.668	1.997	2.384	2.652	66
67	1.294	1.668	1.996	2.383	2.651	67
68	1.294	1.668	1.995	2.382	2.650	68
69	1.294	1.667	1.995	2.382	2.649	69
70	1.294	1.667	1.994	2.381	2.648	70
71	1.294	1.667	1.994	2.380	2.647	71
72	1.293	1.666	1.993	2.379	2.646	72
73	1.293	1.666	1.993	2.379	2.645	73
74	1.293	1.666	1.993	2.378	2.644	74
75	1.293	1.665	1.992	2.377	2.643	75
76	1.293	1.665	1.992	2.376	2.642	76
77	1.293	1.665	1.991	2.376	2.641	77
78	1.292	1.665	1.991	2.375	2.640	78
79	1.292	1.664	1.990	2.374	2.640	79
80	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	80

Sumber: Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Dr. Imam Ghozali)

**Tabel Nilai  $F_{0,05}$   
Degrees of freedom for Nominator**

Degrees of freedom for Denominator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	253	254
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251	252	253	254	254
2	18,5	19,0	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
3	10,1	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,74	8,70	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,53	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,63	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,68	4,62	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40	4,37	4,37
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,00	3,94	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,67	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,57	3,51	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,23	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,28	3,22	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97	2,93	2,93
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,07	3,01	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,71	2,71
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,91	2,85	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,58	2,54	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,79	2,72	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,40	2,40
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,69	2,62	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,30	2,30
13	4,67	3,81	3,41	3,13	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,60	2,53	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25	2,21	2,21
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,53	2,46	2,39	2,35	2,31	2,27	2,22	2,18	2,13	2,13
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,48	2,40	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,07	2,07
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,42	2,35	2,28	2,24	2,19	2,15	2,11	2,06	2,01	2,01
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,38	2,31	2,23	2,19	2,15	2,10	2,06	2,01	1,96	1,96
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,34	2,27	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97	1,92	1,92
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,31	2,23	2,16	2,11	2,07	2,03	1,98	1,93	1,88	1,88
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,28	2,20	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,84	1,84
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,25	2,18	2,10	2,05	2,01	1,96	1,92	1,87	1,81	1,81
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,23	2,15	2,07	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,78	1,78
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,20	2,13	2,05	2,01	1,96	1,91	1,86	1,81	1,76	1,76
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,18	2,11	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,73	1,73
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,16	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,82	1,77	1,71	1,71
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,09	2,01	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,62	1,62
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,00	1,92	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,51	1,51
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,92	1,84	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,39	1,39
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,83	1,75	1,66	1,61	1,55	1,50	1,43	1,35	1,22	1,22
	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,75	1,67	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,00	1,00

Sumber: Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Dr. Imam Ghozali)

Degrees of freedom for Denominator

